

No. 176 Oktober - November 2020

www.baktinews.bakti.or.id

BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



**MELAYANI LANNY JAYA,
MELAYANI PERUBAHAN DAN
MASA DEPAN ORANG LANI**

**MENARI DENGAN TABUHAN
GENDANG SENDIRI**

**THE POWER OF
WOMEN'S STORIES**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTINews
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.baktinews.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU

Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**
Sirkulasi **KHAIRIL ANWAR**

Redaksi

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.baktinews.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.baktinews.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews****

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTI**News** does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.*

MENJADI PELANGGAN BaKTINews****

Subscribing to BaKTI**News**

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTI**News** Online baktinews.bakti.or.id untuk dapat menerima majalah BaKTI**News** langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTI**News** cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

*You may fill out the form available on the BaKTI**News** Online page to be able to receive BaKTI**News** magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTI**News** magazine at the BaKTI office on weekdays.*

Daftar Isi

BaKTI*News*

September - Oktober 2020

No. 176

- 1** Kontribusi Perempuan:
Catatan Konferensi Perempuan
Timur IV
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 5** Melayani Lanny Jaya, Melayani
Perubahan dan Masa Depan Orang Lani
Oleh **LUNA VIDYA**
- 10** Menari Dengan Tabuhan Gendang
Sendiri
Adaptasi Kebiasaan Baru untuk
Kawasan Timur Indonesia
Oleh **ITA IBNU**
- 15** Dibalik Hadirnya Sistem
Administrasi dan Informasi
Kampung Foroma Jaya
Oleh **HALIA ASRIYANI**
- 19** The Power of Women's Stories
Oleh **SERLINIA RAMBU ANAWOLI**
- 24** "SI BASO" Siswa Bebas Asap Rokok
Upaya Pengendalian Konsumsi
Rokok Pada Usia Dini
Oleh **drg. ADI NOVRISA**
- 27** Belajar dari Kesalahan Pengelolaan
Lumpur Tinja
Oleh **GHULANYUDI WJ.**
- 31** Illiterate, Parents Make Sure Their
Children Able to Read Better
Oleh **KIAT Guru**
- 35** Kerentanan Anak terhadap
Kekerasan Selama Pandemi
Oleh **NOPITRI WAHYUNI**
- 37** Pemodelan Pembelajaran Lokal
Sekolah Formal dengan Pendekatan
Sekolah Kampung
Oleh **JOHN RAHAIL**
- 40** Diskusi *Online Live* di Instagram
Story @infobakti
- 41** Batukarinfo.com
- Foto Cover :
Desy Mutialim/Yayasan BaKTI



Foto: Dok. Yayasan BaKTI



Kontribusi Perempuan Catatan Konferensi Perempuan Timur IV

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

P

andemi COVID-19 telah mengubah kehidupan sosial masyarakat di seluruh dunia. Salah satu yang fenomenal adalah manusia benar-benar menjadi makhluk domestik. Manusia bekerja dari rumah, beribadah dan belajar di rumah. Menjadi orang rumahan adalah cara efektif untuk memutus penyebaran COVID-19. Jadilah sebagian besar manusia sebagai pekerja di rumah atau pekerja domestik. Kata “domestik” berasal dari kata Latin *domus* yang berarti “rumah”, jadi manusia adalah makhluk yang hidup di dalam rumah atau terdomestikasi.



Foto: Frans Gosali/Yayasan BAKTI

Selama ini istilah domestik, ruang domestik, dan pekerja domestik ditujukan kepada perempuan. Ketika dihubungkan dengan pekerjaan, maka pekerja domestik dianggap sebagai kerja rendahan atau bukan pekerjaan, sehingga dibayar murah. Karenanya istilah pembantu rumah tangga masih selalu digunakan dibandingkan istilah pekerja rumah tangga (PRT).

Pembagian ruang kehidupan menjadi ruang domestik dan ruang publik tidak hanya menimbulkan kerancuan, tetapi menyebabkan diskriminasi, terutama terhadap perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan berakar sangat dalam di masyarakat yang diperkuat oleh budaya, tafsiran agama, dan kebijakan negara.

Karena itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak yang angkanya terus meningkat, bukanlah peristiwa spontan, tetapi merupakan peristiwa yang terkondisi dalam waktu yang panjang. Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan turun dari langit, tetapi diproduksi dan direproduksi oleh manusia melalui berbagai perangkat dan praktik kehidupan, sehingga diterima sebagai sesuatu yang biasa oleh sebagian masyarakat.

Maria Filiana Tahu, Direktur YABIKU Nusa Tenggara Timur, salah satu narasumber di Konferensi Perempuan Timur IV menyampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan di pedalaman dan kepulauan di kawasan timur

Indonesia, lebih sulit dan kompleks. Maria menyodorkan data yang dikumpulkan oleh FPL (Forum Pengada Layanan), pada 2019 terdapat 1.528 kasus kekerasan di kawasan timur Indonesia, sedangkan pada 2020 sampai bulan Juli saja terdapat 1.023 kasus. Dari 1.528 kasus tahun 2019 terdapat 1.444 korban, artinya sekitar 84 kasus tidak dilaporkan, sehingga tidak tercatat di lembaga manapun.

Menurut Maria, sudah banyak perempuan yang berani melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, tetapi masih ada perempuan yang tidak melaporkan kasusnya, karena dia tidak mau menjadi bahan tertawaan, takut menjadi cibiran masyarakat, atau memang takut karena kasusnya tidak akan selesai dalam proses hukum. Ketakutan tersebut bukan hanya berasal dari masyarakat bawah saja, tetapi juga masyarakat berpendidikan. Maria membeberkan bahwa kasus kekerasan seksual juga terjadi di kampus, tempat orang-orang berpendidikan tinggi, tetapi mahasiswi yang menjadi korban mendiamkan karena takut tidak diluluskan atau kuliahnya mengalami hambatan.

Maria Filiana Tahu adalah salah satu narasumber pada Konferensi Perempuan Timur (KPT) keempat yang dilakukan secara virtual. Konferensi yang berlangsung 26-27 Agustus 2020 tersebut mengangkat tema Memetik Buah dari Sinergi Multipihak untuk Pembangunan Berkeadilan di Indonesia bagian Timur.



Foto: Frans Gosali/Yayasan BaKTI

Konferensi terlaksana atas kerja sama Yayasan BaKTI dan Forum Pengada Layanan (FPL) yang didukung oleh Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan).

Muhammad Yusran Laitupa, Direktur Yayasan BaKTI dalam sambutannya menjelaskan, sejatinya KPT keempat ini dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun karena suasana pandemi COVID-19, maka KPT keempat ini dilakukan secara *online* sesuai dengan protokol kesehatan. Konferensi bertujuan membagikan praktik dan inovasi baik dari gerakan perempuan Indonesia timur untuk menyelesaikan beragam isu hak asasi manusia. Konferensi ini juga memperlihatkan kemampuan daerah bersinergi antara gerakan perempuan, pemerintah dan berbagai pihak untuk mendukung pemberdayaan perempuan.

Inisiatif Perempuan

KPT adalah salah satu kegiatan yang didukung Program MAMPU untuk membagikan praktik dan inovasi baik dari gerakan perempuan di bagian timur Indonesia. Maria Filiana Tahu adalah satu dari perempuan-perempuan yang berinisiatif membantu perempuan yang menjadi korban kekerasan, dan perempuan-perempuan yang terpuruk karena diskriminasi berlapis selama ini.

Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Nur Jannah, Ketua Kelompok Konstituen Bahagia bersama kelompoknya menggalang perempuan untuk mencegah kekerasan terhadap

perempuan dan anak, serta mendampingi mereka ketika harus berurusan dengan lembaga layanan dan lembaga hukum. Sebagai paralegal, Nur Jannah dan kelompoknya harus belajar mengenai hak asasi manusia (HAM), hak-hak perempuan, hak-hak anak, dan proses-proses peradilan, yang memungkinkan mereka dapat mengetahui prosedur pemenuhan hak-hak korban dan layanan yang disediakan oleh negara.

Nur Jannah dan kelompoknya menjadi lembaga yang mengurus rupa-rupa kebutuhan perempuan dan masyarakat miskin di komunitasnya, mulai dari akta kelahiran, surat nikah, beras sejahtera, dan layanan lain yang disediakan oleh pemerintah. Berbagai cara ditempuh untuk menghubungkan komunitas dengan layanan, termasuk menghubungkan konstituen dengan wakilnya di parlemen (DPRD).

Apa yang dilakukan Nur Jannah dan Kelompok Konstituen di Kota Parepare mendapat apresiasi dan pemerintah setempat. Nur Jannah dan beberapa perempuan direkrut oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak) menjadi paralegal untuk mendampingi kasus-kasus perempuan dan anak.

Sementara itu, Suismini, pengurus Kelompok Konstituen di Kota Kendari menggalang pembentukan koperasi untuk mendukung penanganan kasus kekerasan. Menurut Suismini, ketika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang korbannya adalah masyarakat miskin, kadang mereka kesulitan untuk



Foto: Frans Gosali/Yayasan BaKTI

melaporkan kasusnya di lembaga layanan karena alasan biaya. Apalagi kalau kasusnya harus masuk di ranah hukum maka prosesnya panjang sehingga korban harus membutuhkan biaya yang besar untuk itu. Karena itu, perempuan dan anak dari keluarga miskin yang menjadi korban kekerasan, kadang memilih untuk tidak melaporkan kasusnya untuk menghindari pengeluaran yang memberatkan.

Bagi Suismini, inisiatif kelompok konstituen untuk menggalang dana bagi penanganan korban, memang harus dilakukan karena banyak sekali korban kekerasan dari masyarakat miskin dan mereka telah melaporkan kasusnya pada kelompok konstituen. Sementara itu, lembaga layanan tidak menyediakan biaya transportasi dan biaya-biaya lain untuk korban.

Inisiatif Suismini dan kelompoknya membentuk koperasi bukan soal ekonomi semata, tetapi dilatari oleh masalah kekerasan terhadap perempuan yang dalam penanganannya membutuhkan sejumlah biaya.

Untuk Kesetaraan

Inisiatif organisasi masyarakat sipil dan komunitas khususnya kelompok perempuan dalam merespons dan menangani permasalahan yang dialami perempuan, kelompok marginal, dan disabilitas, antara lain kekerasan terhadap perempuan, adalah sesuatu yang harus

diapresiasi oleh siapa pun dan pihak manapun, terutama oleh negara.

Ketika negara tidak mampu memenuhi hak-hak perempuan sebagai warga negara, maka perempuan menggalang komunitasnya untuk membela dan menyelamatkan perempuan-perempuan yang menjadi korban diskriminasi dan ketidakadilan. Inisiatif perempuan di tengah masyarakat dan negara yang patriarki tentu tidak mudah, tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan, terutama perempuan-perempuan di komunitas harusnya menjadi pembelajaran bagi pembuat kebijakan untuk mengubah perspektif dan kebijakan terhadap perempuan.

Perempuan dapat menolong dirinya dan kaumnya melalui inisiatif-inisiatif yang dapat memperkuat masyarakat dan negara. Kontribusi perempuan dalam masyarakat dan negara, bahkan di tengah pandemi COVID-19 sangat nyata. Padahal di tengah pandemi tidak sedikit perempuan yang juga menjadi korban. Perempuan bekerja keras memungkinkan perempuan untuk setara dengan laki-laki sebagai manusia dan sebagai ciptaan Tuhan. Kesetaraan dan keadilan tidak akan terwujud, jika diskriminasi dibiarkan dan dipelihara melalui pikiran dan kebijakan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program MAMPU-BaKTI, dapat menghubungi info@bakti.or.id



Melayani Lanny Jaya, Melayani Perubahan dan Masa Depan Orang Lani

Oleh **LUNA VIDYA**

B

beberapa waktu setelah pandemi COVID-19 membuka luas ruang-ruang virtual, Yayasan BaKTI melakukan beberapa penyesuaian upaya terkait diseminasi informasi terutama terkait pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Salah satu bentuk dari upaya diseminasi informasi itu, adalah dengan memindahkan Diskusi Inspiratif BaKTI, ke dalam ruang virtual yaitu *Live Instagram Story @infobakti*.



Foto: Syaifulah/ Yayasan BaKTI

Program BANGGA Papua, juga diundang untuk mengisi jadwal percakapan di ruang virtual tersebut. Telah ada 3 percakapan tentang BANGGA Papua di ruang virtual Yayasan BaKTI ini. Diawali dengan percakapan bersama Sekretariat Bersama (Sekber) BANGGA Papua provinsi, lalu berturut-turut Sekber Kabupaten Paniai dan Asmat, sebelum kemudian Sekber Lanny Jaya mendapatkan kesempatan menceritakan lika-liku pelaksanaan BANGGA Papua di Kabupaten Lanny Jaya. Kabupaten Paniai, Asmat dan Lanny Jaya adalah kabupaten uji coba yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam pelaksanaan Program BANGGA Papua.

Melayani Lanny Jaya

Lanny Jaya, sebagai kabupaten, masih berusia “remaja”. Dua belas tahun usianya. Tapi Tiom, ibukota Kabupaten Lanny Jaya, punya sejarah panjang, sebagai hub pendidikan dan kesehatan, untuk wilayah Pegunungan Tengah bagian timur yang didiami kaum La Pago. Peran sebagai hub pendidikan dan kesehatan ini berfungsi dengan baik, terutama untuk area yang sekarang menjadi Kabupaten Nduga, Tolikara, dan Puncak Jaya. Wilayah Lanny Jaya, seluruhnya terdiri dari perbukitan dan pegunungan yang sambung menyambung.

Tidak seluruh wilayah Lanny Jaya dapat dicapai dengan kendaraan darat. Meskipun akses jalan darat ke semua pusat distrik yang berjumlah 39 itu telah tersedia dalam berbagai tahapan, beberapa kampung hanya bisa diakses lewat udara dan berjalan kaki. Ketersebaran kampung dan pemukiman Orang Lani, menjadi tantangan kontekstual bagi upaya implementasi program apapun, termasuk Program BANGGA Papua. Distrik Kuyawage distrik terjauh di Lanny Jaya misalnya, yang meskipun sudah dapat diakses oleh mobil jenis truk *pickup* tapi kampung-kampung di distrik ini, hanya bisa didatangi dengan berjam-jam dengan berjalan kaki. Realita ini, tentunya memberi pengertian bahwa strategi dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi. Harus ada strategi penyebaran informasi untuk menjamin tidak seorang pun yang memenuhi syarat dikecualikan dalam program perlindungan sosial ala Pemerintah Provinsi Papua ini. Ditambah lagi, realita keterbatasan sumber daya Sekretariat Bersama (Sekber) BANGGA Papua Lanny Jaya untuk melakukan sosialisasi dengan cara-cara konvensional, yaitu dengan mendatangi setidaknya distrik-distrik yang ada.

Sehingga ketika dari pelosok-pelosok Lanny Jaya, datang 3.635 mama/wali yang sah untuk hadir di Bank Papua Tiom dan Wamena, membuka buku rekening, itu adalah kerja luar biasa. Mereka, para mama ini, datang dari seluruh distrik, wilayah administratif setingkat kecamatan, di Kabupaten Lanny Jaya. Mereka berbondong-bondong datang ke titik pembayaran terdekat dari kampung mereka,



entah di Tiom atau Wamena. Hingga pembayaran dana BANGGA Papua tahap kedua, hanya tersisa 28 kampung yang belum sama sekali terdata calon penerima manfaatnya, dari 355 kampung yang ada. Angka 3.600 lebih orang itu, bicara tentang bagaimana berita tentang BANGGA Papua telah disebarkan, ke seluruh penjuru Lanny Jaya. Untuk hal ini, terutama terkait ketersebaran informasi, para anggota Sekber BANGGA Papua tidak bekerja sendiri. Kepala kampung, kepala distrik, bidan dan kader posyandu, telah menjadi bantuan yang tidak bisa diabaikan. Para pihak ini telah turut berperan mendatangkan para mama/wali penerima manfaat ke titik pembayaran.

Dalam strategi sosialisasi BANGGA Papua, bukan hanya tantangan keterpencilan beserta ketersebaran informasi yang perlu diatasi dalam keterbatasan sumber daya Sekber Lanny Jaya. Kesaksian tentang apa yang menandai kehadiran dan kerja BANGGA Papua, Nicodemus Wanma anggota Sekber dalam wawancara mengatakan, “Masyarakat harus paham, apa gunanya, apa tujuan dari bantuan BANGGA Papua.”

Ketersebaran informasi juga harus didampingi dengan strategi bagaimana mengkomunikasikan pesan kunci BANGGA

Papua, sehingga tujuan BANGGA Papua, persyaratan yang unik dan manfaatnya, dapat dipahami oleh masyarakat, terutama orang tua, keluarga dari kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari BANGGA Papua: anak asli Papua berumur 4 tahun ke bawah. Kenapa demikian penting pemahaman tentang tujuan BANGGA Papua, karena pada dasarnya, pemanfaatan dana ini tidak mensyaratkan apa-apa kepada para penerima manfaat.

Apa guna dan tujuan BANGGA Papua ini, oleh Nico juga merupakan bagian terbaik pembelajaran lewat keterlibatannya dengan BANGGA Papua. “Saya kemudian menyadari, bahwa BANGGA Papua ini berbeda, bukan hanya kasi bantuan, tapi juga pengetahuan. Dana bantuan bisa habis, tapi pengetahuan akan tinggal,” akunya di bagian lain wawancara.

Hasil Peningkatan Kapasitas untuk Melayani Lanny Jaya

Untuk keperluan pesan kunci dipahami, dibutuhkan kecakapan komunikasi. Betul? Sebenarnya ada beberapa kegiatan pelatihan yang disediakan mitra pembangunan yang ikut mendukung BANGGA Papua (MAHKOTA, Yayasan BAKTI-KOMPAK) untuk Sekber di



provinsi maupun kabupaten. Ada pelatihan monitoring dan evaluasi program. Ada juga pelatihan komunikasi persuasif. Hasilnya diakui oleh Jimmy Yigwa telah membuat anggota Sekber BANGGA Papua Lanny Jaya jadi percaya diri ketika berhadapan dengan masyarakat.

Dengan bekal dari pelatihan Monitoring dan Evaluasi, di sisi lain, telah membawa pulang pengetahuan, pengertian baru tentang program, dan apa yang secara strategis dapat dikerjakan. Hasil dari monitoring inilah yang makin meyakinkan para anggota Sekber untuk memastikan bahwa ketersebaran informasi tentang bantuan 200 ribu rupiah/anak/bulan, dari pemerintah harus dilengkapi dengan tersampainya pengetahuan, kenapa penting memperjuangkan kualitas gizi dan kesehatan anak, usia 4 tahun ke bawah, dan bagaimana perjuangan gizi dan kesehatan anak akan berkontribusi ke pada masa depan Orang Lani, masa depan Lanny Jaya. Dengan kombinasi dari keterampilan komunikasi serta hasil monitoring program, anggota Sekber mengembangkan kecakapan komunikasi ini. Kecakapan ini tidak berhenti di percaya diri saja. Mereka pun berinisiatif melakukan alih bahasa materi-materi sosialisasi BANGGA Papua ke dalam

Sekber BANGGA Papua memainkan peran amat penting bagi keberhasilan program. Mulai dari upaya menyebarkan informasi program ke seluruh wilayah di Lanny Jaya, hingga mendampingi proses kelengkapan administrasi yang dibutuhkan untuk menerima dana tunai bantuan BANGGA Papua. Foto: Syaifullah/Yayasan BaKTI

bahasa kaum Lani. Fragmen tentang kerja alih bahasa Sekber Lanny Jaya ini dapat dibaca dalam BaKTI News Edisi 173 yang berjudul Sekber Lanny Jaya, Bekerja Kreatif dalam Keterbatasan.

Sikmen Pekei, Nicodemus Wakma, Jimmy Yigwa, adalah potret bagaimana BANGGA Papua adalah cara melayani Kaum Lani. Bagi 3.600 mama atau wali anak penerima manfaat, pelayanan Sekber BANGGA Papua meliputi upaya menyebarkan informasi ke seluruh wilayah Lanny Jaya, mendampingi proses kelengkapan administrasi yang dibutuhkan untuk menerima dana tunai bantuan BANGGA Papua. Pelayanan itu membuahkan terbitnya 3.600 lebih KTP elektronik, untuk masing-masing mama penerima manfaat.

Bayangkan bersama saya: para perempuan dari keterpencilan lembah dan gunung Lanny Jaya, datang sendiri ke titik pembayaran. Tanpa kemampuan baca dan tulis sekali pun, mereka



duduk di depan *teller* Bank Papua dan menjadi nasabah Bank Papua. Pemandangan inilah yang ingin dibagi seorang Jimmy Yigwa. Bagi Jimmy, pembelajaran terbaik BANGGA Papua, adalah sikap antusias dan kemandirian para mama penerima manfaat, menempuh prosedur administrasi yang disyaratkan kemudian memasuki sebuah sistem keuangan yang tidak mereka kenal sebelumnya, dengan realita sebagian besar dari mereka *tra* tau baca, *tra* tautulis.

Melayani Perubahan, Melayani Masa Depan

“Ada perubahan pengetahuan. Ada pengertian yang sekarang dimiliki oleh mama penerima manfaat. Kalau mereka mengerti, mereka akan pakai uang baik-baik. Bantuan ini memang sedikit untuk orang di pegunungan. Tapi dari yang kecil ini, mereka bisa pelihara anak-anak mereka lalu nanti 20-30 tahun ke depan, kita akan liat hasilnya. Ini yang terbaik, yang saya lihat dari BANGGA Papua,” kesaksian Sikmen Pekkei.

Pengetahuan mengubah perilaku. Inilah yang elemen pelengkap dimensi perubahan di tengah masyarakat Lanny Jaya, terutama penerima manfaat BANGGA Papua. Ada pengetahuan baru tentang pentingnya kualitas kesehatan dan gizi anak yang harus diperjuangkan dari sekarang. Ada

Berbagai macam pelatihan peningkatan kapasitas telah diikuti oleh anggota Sekber BANGGA Papua. Hasilnya diikuti telah membuat para anggota Sekber di Lanny Jaya menjadi lebih percaya diri ketika berhadapan dengan masyarakat.

Foto: Syaifullah/Yayasan BaKTI

ruang baru untuk kaum perempuan Lanny Jaya untuk mengakses sistem perbankan, ketika BANGGA Papua menjadi tiket peradaban bagi mereka. Mereka, mama dan wali penerima manfaat, memegang anak pintu ke masa depan. Bukan hanya untuk anak mereka, tapi juga diri mereka sendiri.

Demikian. Kapasitas yang berkembang, telah menerbitkan empati dan kepedulian, yang berakar pada pemikiran bahwa program, bantuan (dana) bisa datang kapan saja, tapi jika tanpa pengetahuan, berapapun bantuan yang datang, kalau masyarakat tidak mengerti, bantuan ini akan habis begitu saja, mengutip Nicodemus di akhir wawancara. Itulah pembeda BANGGA Papua: bukan cuma dana, tapi pengetahuan juga.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program BANGGA Papua dapat menghubungi info@bakti.or.id

Menari dengan Tabuhan Gendang Sendiri

ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK KAWASAN TIMUR INDONESIA

Oleh **ITA IBNU**

Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada tatanan hidup berbangsa yang berpengaruh pada berbagai sektor pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, kesehatan dan pendidikan.

Berbagai upaya tengah dilaksanakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Di tengah badai ini, ada banyak kisah upaya inspiratif yang tengah dikerjakan berbagai lapisan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. BaKTI percaya, banyak praktik-praktik baik atau inovasi sosial yang dilakukan dengan cara-cara khas Kawasan Timur Indonesia dalam mengurangi dampak COVID-19 yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, pemerintah daerah dan berbagai pihak di KTI

yang dilakukan dengan semangat kerja sama, gotongroyong, dan optimisme.

Sebagai lembaga yang berfokus pada pertukaran pengetahuan tentang program pembangunan di kawasan timur Indonesia, BaKTI menyelenggarakan webinar Forum Kawasan Timur Indonesia untuk mengangkat tiga inisiatif cerdas yang dijalankan oleh para pihak yang berasal dari Kawasan Timur Indonesia yang berhasil menghadapi tantangan pembangunan di masa pandemi dan mampu beradaptasi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mampu beradaptasi terhadap kebiasaan baru. Webinar Forum Kawasan Timur Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 serta ulang tahun BaKTI yang ke-16.



Gotong Royong Pendidikan Daerah 3T di Masa Pandemi

 Ernest Manase

Saat ini di SDI Jimbor, Desa Watu Baru, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat bekerja sama dengan Puskesmas untuk melakukan kunjungan ke kelompok belajar sekaligus pemeriksaan kesehatan anak-anak.

Ernestus Manase, Guru Honor SDI Jimbor Kabupaten Manggarai Barat berbagi cerita mengenai inisiatif yang dilakukan oleh pihak SDI Jimbor bersama pemerintah desa, orang tua siswa, komite dan pengawas sekolah, tokoh masyarakat bergerak bersama mencari solusi pembelajaran di masa pandemi agar anak-anak tetap mendapatkan pelajaran dan pendampingan dari guru tanpa tergantung jaringan internet yang berlaku kehadirannya untuk daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) dengan tetap mempertimbangkan keamanan dan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas pembelajaran.

Berbagai cara dan inisiatif dilakukan oleh pihak sekolah yang didukung oleh orang tua



siswa termasuk komite sekolah untuk tetap menjalankan pembelajaran dari rumah dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa untuk memberikan pelajaran bagi murid-muridnya tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Setiap harinya, guru-guru harus mengelilingi beberapa kampung, menyambangi dari rumah ke rumah untuk memberikan pelajaran bagi murid-muridnya.

Selain itu selama masa PBR pembelajaran dilakukan dengan membentuk kelompok belajar anak berdasarkan kedekatan rumah yang didampingi oleh kader, Kelompok Penerima Layanan (KPL) dan orang tua siswa. Guru akan mendatangi kelompok-kelompok belajar ini untuk memberikan pelajaran dan juga memberikan tugas-tugas. Peran orang tua justru sangat nampak dalam mendampingi anak atau kelompok belajar anak yang nanti didatangi oleh guru-guru. Karena keterbatasan jumlah guru, kegiatan BDR tidak dapat dilangsungkan untuk siswa yang tinggal di tempat yang terlalu jauh dari sekolah.

Selain itu, ada beberapa sekolah yang merasa arus keluar masuk orang ke wilayahnya sangat sedikit sehingga melakukannya dengan sistem *shift*. Ada sekolah yang melakukannya dengan mengurangi jam belajar. Bahkan saat ujian sekolah tiba, di SDI Jimbor tetap melaksanakan ujian kenaikan kelas. Ujiannya dilakukan di dua tempat berbeda. Yaitu di sekolah untuk siswa yang di Dusun Rado dan di Dusun Mbuer disiapkan tempat ujiannya di Mbuer. Sekolah melalui dana BOS, menyediakan masker untuk anak-anak, thermo gun dan juga penyediaan tempat cuci tangan.





Virtual Tour: Adaptasi Kebiasaan Baru Sektor Pariwisata

Iben Yuzenho

Pandemi membuka mata tentang pentingnya ekowisata sebagai kenormalan baru dalam berwisata. Hal ini merupakan peluang baru untuk bangkit dan eksis di abad virtual.

Selamat datang di abad virtual di mana kita melakukan segala aktivitas secara virtual. Di masa pandemi, sebagian besar orang beraktivitas di rumah dan aktivitas virtual meningkat pesat. Iben Yuzenho berbagi inspirasi tentang pengalamannya dalam *sebumi.id* menjalankan *virtual tour* sebagai salah satu adaptasi berwisata baru di masa pandemi.

Sebumi.id adalah sebuah wirausaha sosial yang memberi layanan edukasi terkait konservasi dan ekowisata. Iben dan teman-temannya di *sebumi.id* melebarkan sudut pandang kita untuk turut berkontribusi menjaga kelestarian alam. *Sebumi.id* mengajak kita bepergian untuk terhubung dengan alam, mengenal orang-orang yang berada di destinasi wisata, dan menjadi terhubung dengan diri sendiri.



Iben dan *sebumi.id* yakin bahwa *Virtual Tour* adalah bentuk adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi yang dapat membangkitkan kembali geliat ekonomi dari bidang pariwisata. *Virtual Tour* adalah pengalaman perjalanan ke sebuah destinasi wisata yang dilakukan menggunakan teknologi informasi, komputer dan jaringan.

Virtual tour adalah sebuah peluang yang dapat dilakukan bagi pengelola perjalanan wisata yang mengalami dampak ekonomi akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Namun tentu saja, agar dapat menyelenggarakan sebuah perjalanan wisata virtual, penggunaan teknologi, kurasi (aktivitas, visualisasi, dan informasi) menjadi kunci utama selain *call to action* yang mempromosikan produk lokal yang mampu mendorong ekonomi lokal.



Riset dan Inovasi Biomolekuler sebagai Tanggap Darurat COVID-19 di NTT

Fima Inabuy

Laboratorium biomolekuler sebagai alat tes, alat ukur yang pada dasarnya menjadi ketahanan kita untuk menghadapi pandemi di masa yang akan datang,

Di Kawasan Timur Indonesia, banyak penyakit endemik yang menular melalui virus tidak tertangani karena minim teknologi biomolekuler. Tes PCR-dan teknologi biomolekuler sangat penting untuk menekan laju penularan penyakit endemik (Malaria, DBD)



tes per hari dan 500 tes per minggu (10% dari yang disyaratkan oleh WHO) sehingga ada metode untuk mengatasi ini yaitu dengan mengadakan *pool test*.

Pada prinsipnya *Pool Test* adalah suatu metode tes yang menggabungkan banyak sampel sekaligus dalam satu kumpulan (*pool*) sampel atau satu reaksi yang sama, agar hasilnya dapat dilihat dalam waktu yang lebih cepat, cakupan yang lebih luas (skala komunal, bukan individual) dan biaya tes yang lebih terjangkau.

dan pandemi COVID-19 dan mengurangi jumlah korban meninggal. Ini perlu dipikirkan bagaimana mengembangkan *tools* deteksi dini untuk mengurangi resiko yang lebih besar.

Siapkah kita menghadapi pandemi di masa yang akan datang?

Di tengah keterbatasan fasilitas, keragaman budaya dan kondisi geografis kawasan timur Indonesia kita harus bersiap.

Fima Inabuy, PhD, seorang ilmuwan biomolekular berbagi cerita bagaimana para ia bersama kawan-kawannya di Forum Academia NTT mengagas didirikannya laboratorium biomolekuler di Kupang dan didukung oleh Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur.

Forum Akademia NTT mengagas berdirinya laboratorium biomolekuler dengan menggerakkan dan melatih *volunteer* yang berasal dari akademisi dan peneliti KTI, melakukan inovasi salah satunya bilik sterilisasi. Gagasan membangun laboratorium Biomolekuler dimulai sejak Mei 2020 dengan menjaring kerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat dan pengusaha.

Sejak Juni kemarin, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengumumkan *New Normal*. Salah satu prasyarat untuk menerapkan *new normal* apabila *positivity ratenya* lebih kecil dari 5% selama 2 minggu berturut-turut. Untuk mencapai itu, setidaknya diperlukan 5000 tes setiap minggunya. Saat ini di NTT kurang dari 100



Adaptasi Kebiasaan Baru untuk KTI

 **Samsul Widodo**

“Ada banyak komoditas eksotis yang kita lupakan dan ini harus digarap bersama. Mari kita kerjakan bersama-sama”.

Keynote Speech dari Bapak Samsul Widodo Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI menanggapi mengenai tantangan pembelajaran daring di daerah 3T di masa pandemi. Dari awal 2018 isu tidak adanya guru di daerah 3T telah menjadi tantangan tersendiri, dan saat ini

tantangannya bertambah bertambah karena kendala jaringan internet.

Tantangan keterbatasan guru dan pembelajaran tetap berjalan berusaha dipecahkan dengan aplikasi HaloHOLA, sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh *start up*. Proses kerjanya dengan mengunduh semua materi pembelajaran didukung oleh aplikasi Zenius dan Quipper kemudian dimasukkan ke dalam 1 alat yang mampu memancarkan sinyal *Wifi* yang tanpa pulsa, selama ada listrik dan nanti akan dipancarkan ke kelas-kelas tanpa kabel sekalipun. Alat ini pula mampu menampung 1.000 video dan 10.000 buku elektronik. Sehingga walau guru tidak hadir, siswa masih dapat memperoleh pengajaran dari materi ini. Ini bisa menjadi salah satu alternatif. Terbukti di beberapa *pilot project* bisa membawa dampak signifikan.

Solusi lain untuk Pembelajaran Jarak Jauh bagi desa yang telah memiliki sinyal namun belum ada koneksi internet dapat bekerja sama dengan Bumdes dan *Internet Service Provider* untuk memasang *Wifi* di rumah warga atau di tempat umum di desa, dan dapat dijadikan unit usaha di desa. Bisa pula menggunakan dana desa untuk membayar koneksi jaringan. Ada beberapa solusi tergantung dari kondisi dari masing-masing desa.

Dana Desa juga dapat dimanfaatkan untuk membantu sekolah dalam hal pengadaan masker, *hand sanitizer*, dan alat cuci tangan. Dana desa dapat dimaksimalkan pemanfaatannya untuk penanggulangan COVID-19 di tingkat desa. Kemendesa mengharapkan kepala desa harus lebih proaktif melaporkan kondisi desanya.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kemendesa untuk Indonesia Timur. Di masa pandemi saat di mana banyak pedagang lokal, distributor kebutuhan bahan pokok yang kehilangan pasar, Dirjen PDT Kemendesa akhirnya membuat *pilot project* bekerja sama dengan Desa Detusoko, Kabupaten Ende NTT membuat aplikasi *Whatsapp Store* aplikasi *online* www.dapurkita.bumdesmart.id untuk memasarkan produk lokal. Layanan ini telah menjangkau seluruh desa di Ende dan telah membuka cabang hingga ke Maumere.



Host
Luna Vidya

*Indonesia Tanah Beta,
kami dari Indonesia Timur berhak mengatakan
hal yang sama
dengan kepala tegap, dada membusung,
sekali pun punggung kami berkala matahari.*

*Siang ini, gendang adalah cerita tentang
sumber daya, keunikan, keunggulan yang
kita miliki di tempat-tempat tersembunyi.*

*Siang ini, gendang adalah pemberian,
yang mau atau tidak mau ada di depan mata,
terletak di halaman kita untuk kita kerjakan.*

*Untuk tanah seluas Kawasan Timur Indonesia,
yang kita butuhkan adalah orang-orang
yang berani mengambil pijakan
di atas bunyi gendang
kemudian menari.*

*Percayakah Bapak/Ibu semua bahwa
ketika gendang pakkanjara ditabuh
dengan riuh gempita itu
untuk memberikan landasan bagi
tarian Pakkerena yang bergerak dengan lamban.*

*Kita mungkin terlihat lamban,
tapi inilah kita
dengan kekuatan, kemampuan kita
akan menjadi masa depan Indonesia.*

*Mari menari dengan gendang kita sendiri
mari menjadi tempat Indonesia berbalik
sungguh di timur di mana matahari terbit
ada hal-hal yang bisa menjadi inspirasi.*

Luna Vidya, September 2020

INFORMASI LEBIH LANJUT

Webinar ini dapat Anda simak kembali di:
<http://bit.ly/webinarForumKTI>



Dibalik Hadirnya Sistem Administrasi dan Informasi Kampung Foroma Jaya

Oleh
HALIA ASRIYANI

Bu kami sudah selesaikan pendataan di Kampung Foroma Jaya. Kami mau belajar penginputan sekarang.” Ungkap Yance Nasua, Kepala Desa Foroma Jaya, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Siang itu ia datang ke Kota Kaimana bersama dengan dua orang kader kampungnya. Kehadirannya yang tiba-tiba cukup mengagetkan bagi Ernawati Tanggarofa, Koordinator Distrik Kaimana untuk Program KOMPAK-LANDASAN. Padahal Erna sebenarnya menunggu kabar dari kepala kampung untuk diminta mendampingi proses pendataan di kampung tersebut, namun tak diduga justru sudah selesai.

Kaimana, daerah dengan julukan “Kota Senja Indah” ini memang memiliki pemandangan yang indah. Melihat matahari terbenam dari pinggir



Kader Kampung Foroma Jaya melakukan penginputan Data (kiri). Kordis mengajarkan penginputan kepada kader kampung (kanan). Kampung Foroma Jaya adalah satu dari 89 kampung di Provinsi Papua Barat menjadi wilayah sasaran Program SAIK+.

Foto : Dok. Yayasan BaKTI

pantainya akan memberi pengalaman yang menyenangkan. Kaimana merupakan satu dari delapan kabupaten sasaran Program KOMPAK-LANDASAN di Papua dan Papua Barat selain Jayapura, Nabire, Asmat, Boven Digoel, Manokawari Selatan, Sorong dan Fakfak. Sebagaimana di kabupaten lainnya, di Kabupaten Kaimana, Program SAIK telah berjalan sejak tahun 2017 didampingi oleh Tim KOMPAK-LANDASAN.

Untuk program SAIK+ yang merupakan bentuk pemutakhiran dari Program SAIK, sejumlah 89 kampung di Provinsi Papua Barat menjadi wilayah sasaran program. Salah satu kampung itu adalah Kampung Foroma Jaya yang terletak di bagian timur Kabupaten Kaimana. Untuk mencapai kampung tersebut, terlebih dahulu kita harus melewati perjalanan darat sekira 10 kilometer. Perjalanan ini pun tidak mudah karena harus melalui jalan berliku dan berbukit serta sejumlah ruas jalan yang rusak. Tidak sampai di situ saja, setelahnya kita harus melanjutkan perjalanan dengan jalur laut melalui Kolam Sisir yang terletak di wilayah

Kampung Marsi. Menumpang perahu dengan perjalanan kurang lebih 40 menit, barulah kita akan tiba di Kampung Foroma Jaya.

Foroma Jaya membentang dari pesisir hingga di atas bukit yang seluruhnya dihubungkan oleh jalan setapak. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Kelapa, pisang, pinang dan umbi-umbian banyak ditemukan di kampung ini. Sayangnya Kampung Foroma Jaya masih menjadi wilayah yang tidak didukung dengan jaringan telepon dan internet sama sekali. Sangat sedikit informasi yang dapat diperoleh tentang kampung ini. Padahal ada cukup potensi alam yang dapat dijelajahi di tempat ini.

Setelah bertemu dengan Ernawati, Koordinator Distrik Kaimana, yang menjelaskan tentang SAIK+ dan proses pengerjaannya, Pak Yance pun kembali ke kampung. Nyaris tidak ada kabar lagi mengingat tak ada jaringan telepon di kampung tersebut. Namun betapa terkejutnya Erna ketika lima hari kemudian ia memperoleh kabar dari Pak Yance bahwa proses pendataan di Kampung Foroma Jaya telah selesai dilakukan. Padahal menurut Erna, dirinya belum mengajarkan banyak hal mengenai pendataan. Ia justru menunggu kabar dari kepala kampung untuk dipanggil mendampingi kader dalam melakukan pendataan.

Pak Yance mengakui bahwa setelah mengetahui tentang Program SAIK+ oleh Program KOMPAK-LANDASAN ini, pihaknya langsung tertarik. "Saya tertarik karena memang saya liat proses pendataannya menunjukkan kalau data ini pasti akan akurat karena memang dikumpulkan secara langsung. Jadi saya langsung coba lakukan sendiri," papar Pak Yance. Memang ia sendirilah bersama dengan sekretaris kampungnya yang mulai melakukan pendataan. Pendataan ini mereka lakukan sembari melakukan proses pemilihan dan penentuan



kader kampung. Setelah dipilih dua orang kader kampung, Pak Yance sendiri pula yang menjelaskan dan mengajarkan tentang tata cara pendataan SAIK+. Proses pendataan pun dilanjutkan oleh kedua kader kampung ini hingga selesai.

Ketika menghubungi Erna bahwa pihaknya telah menyelesaikan pendataan, Pak Yance tengah berada di Kota Kaimana membawa kedua kadernya. Hari itu, Pak Yance bersama kedua kadernya menyewa penginapan di Kota Kaimana agar dapat melakukan verifikasi data dan belajar melakukan penginputan data SAIK+. Bersama Koordinator Distrik Kaimana, selama satu hari mereka belajar menginput data SAIK+. Hasilnya pada hari itu mereka berhasil menginput 3 kepala keluarga dalam proses belajar tersebut.

Hal yang lebih mengejutkan lagi adalah 4 hari setelahnya, kader kampung telah selesai menginput data seluruh penduduk di Kampung Foroma Jaya. Padahal sebelumnya mereka sempat terkendala oleh perangkat laptop yang rusak dan jaringan yang tidak maksimal. Dengan demikian, Kampung Foroma Jaya pun menjadi kampung pertama yang telah menyelesaikan pendataan dan penginputan data SAIK+ dari 17 kampung yang menjadi sasaran program SAIK+ di Kabupaten Kaimana. “Saya tidak sangka

Kampung Foroma Jaya bisa secepat ini. Bahkan bisa dibilang saya hanya memberikan pengantar saja dan sisanya dikerjakan sendiri oleh kampung,” ujar Erna, kagum.

“Kami semangat karena ini demi kampung kami sendiri ke depannya bisa lebih baik,” ungkap Obet Nagwasai, salah satu Kader Kampung Foroma Jaya. Para kader kampung memang adalah anak muda potensial yang berasal dari kampung tersebut. Mereka dipilih dan diangkat langsung oleh kepala kampung untuk bertugas dalam membantu sejumlah urusan administrasi kampung. Melihat semangat dari kepala kampungnya, mereka pun ikut terpacu untuk bekerja dengan maksimal. “Kami menggunakan laptop saja belum terlalu lancar, tapi kami mau belajar untuk pengerjaan SAIK+ ini. Terima kasih untuk LANDASAN yang sudah mendampingi kami,” Erik Nagwasai, satu kader lainnya, menambahkan.

“Data SAIK ini lengkap sekali. Semua data yang kami perlukan untuk perencanaan kampung semua ada di situ,” kata Pak Yance. Dia melanjutkan, “Kita bisa buat program kampung yang baik dan tepat sasaran dengan data ini.”

Bapak Yance sendiri baru saja terpilih menjadi Kepala Kampung di kampung tersebut.



“Ini tahun pertama saya sebagai kepala kampung dan saya mau lakukan yang terbaik. Beruntung ada Program KOMPAK-LANDASAN yang mendukung kami,” katanya.

Memiliki sistem informasi yang lengkap memang akan sangat membantu dalam pemerintahan dan pembangunan kampung karena bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kampung. Sementara itu, menyadari pentingnya sistem administrasi dan informasi yang memadai, program Replikasi SAIK pun tengah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk seluruh wilayah di Papua Barat. Data SAIK tersebut nantinya diharapkan bisa terintegrasi dengan distrik, kabupaten dan instansi-instansi yang terkait seperti Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Badan Pusat Statistik maupun instansi terkait lainnya.

Proses pengerjaan SAIK+ ini sebenarnya adalah proses yang tidak bisa dikatakan gampang. SAIK+ ini mulai dikerjakan dengan memperkenalkannya kepada pemerintah provinsi, kabupaten hingga kampung. Selanjutnya menyiapkan kader kampung yang akan melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Setelah data seluruh penduduk tersedia,

Kolam Sisir, tempat penyeberangan ke Kampung Foroma Jaya (kiri). Kepala Kampung dan Kader Kampung Foroma Jaya (kanan). Foto : Dok. Yayasan BaKTI

langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi data dilanjutkan dengan penginputan satu per satu data ke dalam aplikasi SAIK+. Meski demikian, ada semangat-semangat besar di antara sulitnya pekerjaan ini. Seperti yang ditunjukkan oleh Kepala Kampung bersama dengan Sekretaris dan Kader Kampung Foroma Jaya.

Semangat seperti inilah yang rasanya memberikan energi untuk terus bekerja dalam menyiapkan Sistem Informasi dan Administrasi Kampung bagi masyarakat Papua dan Papua Barat. Tim KOMPAK-LANDASAN menyadari bahwa dengan sistem administrasi dan informasi yang memadai, pembangunan akan berjalan dengan lebih maksimal dan terarah. Bertemu dengan orang-orang yang berpikiran demikian, rasanya seperti menemukan harapan besar terwujudnya pembangunan dan ketersediaan layanan dasar masyarakat yang berkualitas di Tanah Papua ke depannya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN Fase II, dapat menghubungi info@bakti.or.id

The Power of Women's Stories

Oleh **SERLINIA RAMBU ANAWOLI**

Isu pembahasan tentang perempuan sesungguhnya merupakan isu yang belum berujung untuk dibahas dan didiskusikan dalam berbagai bidang kajian, forum ilmiah, ruang kelas, serta dalam berbagai momen baik oleh individu ataupun kelompok organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Namun sayangnya, pembahasan mengenai perempuan ini ternyata masih lebih mengarah pada perempuan sebagai objek pemikiran, bukan menjadi subjek pemikiran yang terlibat langsung dalam wacana pemikiran tentang perempuan. Maka tidak heran



banyak narasi tentang perempuan yang selalu memposisikan perempuan pada posisi yang *vulnerable* (baca: objek kekerasan dan ketidakadilan, miskin, dan tidak berdaya). Keseriusan dunipun terkait isu perempuan dapat dilihat dalam tujuan lima tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yaitu *gender equality* dengan enam target untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Ketertarikan saya pada isu-isu perempuan dimulai sejak melihat beberapa teman saya pada satu kuliah di Kupang mengalami kekerasan dari pacar mereka. Pada awalnya saya merasa itu bukan urusan saya tetapi setelah terjadi berulang-ulang membuat saya marah dan menuntut diri saya

untuk harus bertindak. Saya mulai belajar tentang apa itu gender dan segala seluk beluknya, saya mulai bergabung dalam organisasi mahasiswa Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), mengikuti pelatihan pengorganisasian dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) di Timor Barat. Saya mengorganisir mahasiswa-mahasiswa perempuan, mama-mama pesisir Pantai Oesapa dan Fatululi untuk membuat diskusi-diskusi penyadaran kritis hingga terbentuk Balai Perempuan Mahasiswa Kupang, Balai Perempuan Pesisir Pantai Oesapa dan Balai Perempuan Maju Bersama Fatululi. Saya juga terlibat aktif dalam kampanye *We Can Stop Violence Against Women* bersama *change maker* Perkumpulan Relawan CIS TIMOR.

Tujuan dari beragam aktivitas dan kegiatan saya dalam perjuangan isu-isu perempuan adalah perempuan harus bisa bersuara, perempuan harus diperkuat kapasitasnya untuk bersuara, yang pada akhirnya perempuan harus menyadari bahwa suaranya mampu menginspirasi dan membuat perubahan sosial dalam keluarganya dan komunitasnya.

Para Anggota Balai Perempuan Fatumnasi
Foto: Serlinia Rambu Anawoli



Foto: Serlinia Rambu Anawoli



Tahun 2018, saya terpilih dan mendapatkan satu kesempatan belajar yang bermakna dalam Indonesian Young Leader Program (IYLP) di Selandia Baru. Sebuah kesempatan belajar yang luar biasa selama 6 bulan untuk mempertajam kemampuan Bahasa Inggris dan memperdalam wawasan pengetahuan saya terkait isu gender *justice* serta keahlian menjadi penggerak komunitas yang inovatif dan progresif. Dalam program ini juga, saya dimentoring oleh Carol Beaumont, seorang politikus perempuan dan ketua koalisi perempuan Selandia Baru cabang Auckland, yang membantu saya untuk menggali pengetahuan tentang keadilan gender di Selandia Baru dan segala tantangannya, menghubungkan dengan beberapa organisasi perempuan di Selandia Baru.

Selain itu, saya berkesempatan mendengarkan kekuatan cerita perempuan Selandia Baru 125 tahun yang silam ketika mereka berjuang dan menjadi negara pertama di dunia yang memberikan hak politik bagi perempuan serta kerja-kerja kolaborasi para aktivis perempuan, penulis perempuan, organisasi perempuan, perempuan masyarakat adat Maori dan Pasifica. Ada nilai yang berbeda ketika belajar dan mengunjungi komunitas masyarakat adat Maori di mana mereka menempatkan perempuan dan semua yang rentan sebagai subjek

bukan sebagai objek dalam artian bahwa mereka fokus melihat kekuatan dan bukan kerentanan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Hal ini menjadi menarik karena dalam melakukan pemberdayaan terhadap perempuan atau kelompok lainnya, tidak melibatkan mereka sebagai penerima manfaat saja tetapi bersama-sama untuk mendesain ide dan kerja pemberdayaan bersama.

Setelah kembali ke Indonesia, saya membuat satu proyek terapan atas dukungan program IYLP yang didukung sepenuhnya oleh Kementerian Luar Negeri Selandia Baru yang diselenggarakan oleh UnionAid yaitu *The Power Of Women's Stories*. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mendapatkan gagasan-gagasan atau ide serta peluang dari narasi perempuan dalam merencanakan kerja-kerja organisasi ke depan dalam meningkatkan kapasitas, kepercayaan diri, pengetahuan dan pemberdayaan supaya perempuan bisa menemukan suaranya, diperkuat suaranya dan kekuatannya untuk bisa berdiri sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri, keluarga dan komunitasnya.

Proyek ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama, merekam atau mendokumentasikan pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menulis dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan bagi perempuan dalam keluarga dan



komunitas yang mungkin membatasi mereka untuk menjadi pemimpin atau bersedia dicalonkan menjadi pemimpin walaupun dalam komunitas untuk skala yang lebih kecil. Ketiga menciptakan ruang belajar, berbagi dan berdaya bagi perempuan dan komunitas melalui sebuah pameran dan *workshop*. Keempat, melihat pengaruh konsep maskulin dan feminim terhadap eksistensi kemandirian dan kepemimpinan perempuan.

Action idea saya adalah mengumpulkan cerita perempuan marginal dari Kota Kupang dan Timor Tengah Selatan. Cerita mereka akan mencakup peran mereka dalam keluarga dan komunitas, serta melihat pengaruh budaya yang menyatakan bahwa perempuan tidak bisa jadi pemimpin, pelengkap saja dan mereka sangat rentan. Harapan dari pendokumentasian kekuatan cerita perempuan ini adalah perempuan dan anak perempuan menyadari potensi dan kekuatan dan bisa mentransformasi perspektif pemikiran mereka tentang pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan. Dengan memahami nilai-nilai dan kekuatan yang mereka miliki membuat mereka aktif dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup baik perempuan maupun laki-laki.

Melalui pertemuan asesmen awal bersama anggota Balai Perempuan maka terpilih sepuluh perempuan yang bersedia untuk bercerita dan

Mama Martha Sesfao ketika menenun sebuah sarung (kiri). Nene Ema dengan anakan mangrove yang sudah siap tanam (kanan). Foto : Serlinia Rambu Anawoli

direkam cerita mereka dengan beragam keunikan latar belakang kehidupan, pekerjaan, pengalaman dan pendidikan. Dari sepuluh cerita perempuan yang terdokumentasi, ada benang merah yang menghubungkan satu cerita dengan cerita lainnya. Pertama, perempuan dan lingkungan; Mama Maria Sanam, perempuan penjaga batu di Fatumnasi; Mama Naema Bisslisin, perempuan penggerak dan penjaga ekosistem mangrove Oesapa; Mama Welly Banamtuan-Sole, perempuan kreatif dan sampah plastik. Kedua, perempuan dan pendidikan; Mama Elsy Loak, Inisiator PAUD Blessing di Pesisir Pantai Oesapa; Mama Onan Krisnawati Sabuin, menemukan makna menjadi guru dari pedalaman Papua; Mama Martha Sesfao, tenunan dan pendidikan tinggi bagi anak-anaknya. Ketiga, perempuan pekerja sektor informal; Mama Erna, perempuan kepala keluarga dan petani; Mama Yanti Boimau, ibu rumah tangga yang produktif. Keempat, kepemimpinan perempuan dan penggerak ekonomi kreatif serta media; Mama Margarita



Sipa-Eluama, perempuan petarung sejati; Nona Jestiani Jazica Wiliningsih Pitanuki, perempuan penggerak ekonomi kreatif dan media.

Ketika mendengarkan cerita-cerita yang dituturkan dengan bahasa mereka sendiri, ada yang bercerita dengan air mata, ada yang bercerita dengan senyum, tertawa, dan ada yang bercerita dengan penuh kebanggaan. Suami, anak-anak, sahabat dan orang-orang di sekitar mereka juga turut merasakan haru, kebanggaan dan kebahagiaan ketika mereka menarasikan kehidupan dan peran mereka. Kumpulan cerita perempuan ini akan dibuatkan dalam sebuah pameran cerita perempuan bersama Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Timor Tengah Selatan pada bulan Oktober 2020 dan juga dapat dibaca cerita lengkapnya melalui www.serliniarambuanawoli.wordpress.com. Narasi dan cerita merekalah yang turut membangun narasi-narasi perempuan yang kuat, berdaya dan menginspirasi perempuan lainnya.

Dari proses perekaman cerita, saya menemukan dibalik kerentanan seorang perempuan tersimpan sejuta kekuatan yang jarang terucapkan atau terdengarkan. Semakin banyak kekuatan perempuan dibicarakan, semakin banyak

Mama Welly dan kreasinya.

Foto : **Serlinia Rambuanawoli**

perempuan akan menyadari pentingnya berdaya, bersuara dan menjadi inisiator perubahan sosial bagi dirinya, keluarganya dan komunitasnya. Dengan semakin banyak perempuan berdaya, perempuan akan mampu mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya.

Marilah kita menciptakan narasi dan cerita kehidupan kita yang setara, adil dan anti kekerasan dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani antara perempuan dan laki-laki yang dimulai dari rumah tangga sampai masyarakat tanpa diskriminasi. Biarlah dengan fokus perhatian kita pada setiap kekuatan kita, memampukan kita untuk tetap berpikir optimis pada kerja-kerja pemberdayaan yang kita lakukan bersama. Jika perempuan berdaya maka akan menghasilkan generasi yang unggul untuk Indonesia maju.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Sekretaris KPI Cabang Kota Kupang & Alumni Program INSPIRASI 2018 dan dapat dihubungi melalui email: seranawoli87@gmail.com



“SI BASO” SISWA BEBAS ASAP ROKOK

UPAYA PENGENDALIAN KONSUMSI ROKOK PADA USIA DINI

Oleh **drg. ADI NOVRISA**

Pemeriksaan kadar CO oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar di sebuah sekolah di Kota Makassar.

Foto : Dok. Dinkes Kota Makassar

Berdasarkan Pendataan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2017, dari data 63.301 orang/siswa, terdapat sejumlah 6.332 anak laki-laki dan 50 anak perempuan berusia dibawah 18 tahun yang merokok, atau mencapai 10,5% sedangkan angka nasional berdasarkan RISKESDAS 2018 yaitu 9,2%. Hal ini tentu saja tidak mencapai tujuan RPJMN yang menyebutkan angka 5,4% untuk perokok dibawah 18 Tahun.

Untuk itu, Dinas Kesehatan Kota Makassar melakukan inovasi SI BASO (Siswa Bebas Asap Rokok). Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang dampak buruk dari rokok dan paparan asap rokok sehingga dapat menurunkan angka perokok remaja berusia dibawah 18 tahun serta meningkatkan konsentrasi belajar anak/siswa sehingga prestasi sekolah meningkat. Sedangkan tujuan inovasi ini bagi instansi pendidikan/sekolah adalah untuk



memberikan intervensi ke anak/siswa yang mengalami penurunan kadar CO dengan adanya kartu kontrol konseling (kartu Periksa), mewujudkan sekolah Bebas Asap Rokok menuju sekolah ADIWIYATA serta menurunkan angka Penyakit Tidak Menular (PTM) khususnya penyakit Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi yang merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Total remaja yang mengikuti kegiatan Inovasi Siswa Bebas Asap Rokok (SI BASO) ini pada tahun 2018 mencapai 750 anak yang mengikuti sosialisasi, pemeriksaan kadar CO dan konseling. Setelah dilakukan inovasi ini didapatkan hasil 519 anak mengalami penurunan kadar CO. Pada tahun 2019 mencapai 1.478 anak yang mengikuti sosialisasi, dan didapatkan hasil 1.134 anak mengalami penurunan kadar CO. hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perubahan sikap remaja terhadap rokok. Temuan terkini mengenai COVID-19 menyebutkan bahwa adanya risiko penularan COVID-19 yang lebih tinggi bagi perokok, serta tingkat keparahan yang lebih tinggi pada pasien perokok dibanding dengan pasien non perokok. Salah satu hal yang penting yaitu peningkatan pengetahuan khususnya

tentang bahaya sebagai perokok pasif. Karena hal ini masih banyak belum diketahui oleh masyarakat khususnya remaja berusia dibawah 18 tahun.

Inovasi Siswa Bebas Asap Rokok (SI BASO) memberikan inisiatif yang berperan penting terhadap pelayanan publik dalam mengurangi iklan rokok dan penjualan rokok di sekitar wilayah sekolah. Inovasi ini memberi dampak yang sangat signifikan kepada remaja terutama memberi perlindungan bagi kelompok yang paling rentan mendapat dampak rokok yaitu remaja.

Inovasi SI BASO memiliki keunikan di mana inovasi ini dilakukan dengan jemput bola turun langsung ke sekolah untuk melaksanakan sosialisasi dan konseling layanan upaya berhenti merokok (UBM) di sekolah. Upaya ini dilakukan untuk memudahkan pemberian pelayanan langsung ke pelajar dan mengatasi masalah waktu, biaya bagi pelajar yang ingin menggunakan fasilitas ini selain itu kepatuhan siswa lebih tinggi bila dilakukan di sekolah.

Agar dapat dijalankan secara maksimal, Inovasi Siswa Bebas Asap Rokok (SI BASO) terintegrasi dengan kegiatan upaya berhenti merokok yang dilakukan oleh Puskesmas. Pada



Pemeriksaan kadar CO dan sosialisasi bahaya rokok oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar di sebuah sekolah di Kota Makassar (kiri). Poster kampanye anti rokok untuk sekolah (kanan). Foto : Dok. Dinkes Kota Makassar

Tahun 2019 Pemerintah Kota Makassar telah memberikan apresiasi melalui Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Makassar, dan Pada Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan memberikan Apresiasi TOP 30 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi. Ini menjadi lahan studi tiru bagi Dinas Kesehatan Bontang Kalimantan Timur, Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Untuk datang berkunjung melihat inovasi ini dan rencana akan mengadaptasi inovasi tersebut, kunjungan *Benchmarking* dari DPRD Provinsi Gorontalo dan DPRD Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil evaluasi ditemukan jumlah anak yang mengikuti sosialisasi meningkat sebanyak 49,26%, dan di tahun 2018 sebanyak 69,2% anak mengalami penurunan kadar CO sedangkan pada tahun 2019 anak yang mengalami penurunan kadar CO sebanyak 76,7%. Data ini dapat diartikan menurunnya atau bahkan berhenti sama sekali dalam konsumsi rokok. Dampak lain inovasi untuk masyarakat melalui

Setelah dilakukan inovasi ini didapatkan hasil 519 anak mengalami penurunan kadar CO. Pada tahun 2019 mencapai 1.478 anak yang mengikuti sosialisasi, dan didapatkan hasil 1.134 anak mengalami penurunan kadar CO. hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perubahan sikap remaja terhadap rokok.

analisis *cost benefit*, bahwa dengan menghentikan perilaku merokok seseorang maka akan menghemat biaya pengeluaran rutin rumah tangga sebanyak Rp 7,3 juta selama 5 tahun, tentu ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi Siswa Bebas Asap Rokok (SI BASO) menggunakan biaya yang murah, sederhana serta tidak membutuhkan teknologi modern, namun keberlangsungan Inovasi SI BASO sangat tergantung pada kepatuhan masing-masing dalam melaksanakan Inovasi Siswa Bebas Asap Rokok (SIBASO).

Setelah dilakukan selama setahun beberapa manfaat yang didapat adalah peningkatan pengetahuan siswa yang mendapat intervensi tentang dampak rokok, dan sebagian besar siswa perokok juga menunjukkan penurunan angka CO yang mengindikasikan adanya perubahan sikap terhadap merokok, apakah mereka berhenti atau mengurangi jumlah batang yang dikonsumsi. Hal ini juga sesuai dengan tujuan dari Perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok) No. 4 Tahun 2013 yaitu melindungi remaja dari dampak buruk rokok.

Inovasi Siswa Bebas Asap Rokok (SI BASO) juga mendemonstrasikan bagaimana dinas kesehatan, LSM, Dinas Pendidikan serta masyarakat setempat dapat mengatasi masalah perokok remaja di wilayah kota besar melalui sistem kerja sama yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Inovator SI BASO dan Kasie Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Makassar dan dapat dihubungi melalui email: usmhatiwa@gmail.com



Belajar dari Kesalahan Pengelolaan Lumpur Tinja

Oleh **GHULANYUDI WJ.**

Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) atau dikenal juga dalam istilah lain, pengelolaan lumpur tinja (*fecal sludge management*), tidak dapat dilakukan dengan pendekatan tunggal dan dalam durasi waktu tertentu atau temporal saja. Untuknya harus disiapkan pendekatan multiaspek, dilakukan menyeluruh dari hulu hingga hilir serta dalam rentang waktu berkelanjutan. Multi aspek meliputi aspek teknis, regulasi, kelembagaan, pendanaan, advokasi dan komunikasi.

Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan sejumlah kabupaten/kota di Indonesia,

melakukan PALD dengan pendekatan pada salah satu aspek hanya akan membuang waktu, tenaga dan biaya. Keberhasilan tidak dapat diraih dan hanya akan meninggalkan permasalahan baru. Salah satu misalnya, melakukan PALD dari aspek teknis dengan membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Dari sisi output proyek memang sudah ada output atau keluaran yang dihasilkan yakni terbangunnya IPLT. Namun dari sudut perubahan atau dampak dari pembangunan IPLT, masih jauh dari harapan. Pasalnya, bagaimana bisa berdampak jika tidak ada lembaga yang mengelola operasional IPLT? Di samping itu, tidak adanya peraturan untuk pemanfaatannya dan tidak ada biaya pemeliharaan atau operasionalnya.



Foto: Dok. Ghulamyuadi WJ

Lebih jauh lagi, pembangunan PALD tidak diadvokasikan kepada pengambil kebijakan untuk mendapatkan komitmen dukungan dan kepada masyarakat pun tidak disosialisasikan peran dan kewajiban mereka. Alhasil, model pembangunan PALD dapat dipastikan tidak akan berhasil dan hanya akan menciptakan IPLT mangkrak dan tidak termanfaatkan. Bahkan persoalan baru muncul, yakni bangunan fisik IPLT menjadi bangunan mati tak berfungsi.

Buku "Profil Sanitasi Sulawesi Selatan Tahun 2019" yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat

Jenderal Cipta Karya Balai Sarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan menyebutkan dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan hanya ada 7 (tujuh) kabupaten/kota yang IPLTnya berfungsi. Sebanyak 6 (enam) IPLT belum berfungsi, 2 rusak dan ada 9 (sembilan) kabupaten/kota yang tidak memiliki IPLT.

Dari data ini, setidaknya kita bisa menebak apa yang terjadi di 8 kabupaten/kota tersebut. Jika kita benar-benar menyimak kronologis prosesnya, penyebab utamanya dapat dipastikan karena PALD yang dilakukan parsial dan tidak menyiapkan aspek-aspek pendukungnya. Secara kebetulan, penulis pernah berkunjung ke sejumlah kabupaten/kota yang telah memiliki IPLT yang belum berfungsi tersebut. Dan benar memang, di sana hanya diutamakan aspek teknis saja, pokoknya membangun IPLT. Atau ada juga yang dilengkapi dengan pembelian truk tinja. Tapi apa yang terjadi? Sama saja, IPLT dan truk tinja juga tidak termanfaatkan. IPLT mangkrak, truk tinja rusak dan sampai tua tak bisa dijalankan fungsinya.

Sebagai manusia yang berakal, kita tentu tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Sejarah baru yang lebih baik harus diciptakan, minimal untuk menghapus sejarah kelam masa lalu dan memberi warisan berupa lingkungan sehat kepada anak cucu. Apa yang saat ini dilakukan Kota Palopo, Parepare dan Kabupaten Pinrang adalah bagian dari ikhtiar menciptakan sejarah baru itu. Ketiga wilayah sedang berupaya memperbaiki PALD-nya. Meningkatkan layanan, memperbaiki kondisi kesehatan lingkungan.

Twinning Program

Ketiga kabupaten/kota tersebut saat ini sedang mengikuti sebuah program untuk menciptakan kabupaten/kota kembar dalam PALD. PALD di sini adalah PALD yang utuh dan menyeluruh serta berkelanjutan. PALD yang ideal dan dicita-citakan bersama, bernama Twinning Program.

Program ini digagas Forum Komunikasi Air Limbah (FORKALIM) nasional. Implementasi program di Sulawesi Selatan pembiayaannya didukung UNICEF Indonesia dan dilaksanakan bekerja sama dengan Yayasan BaKTI serta dibantu fasilitas Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Provinsi Sulawesi Selatan.

Setidaknya ada 3 hal menarik dari program ini, yang sejauh ini memiliki peran cukup signifikan untuk keberhasilan program. Kedua hal itu adalah adanya mentor, lalu isu atau topik yang menjadi pokok bahasan dalam proses pendampingan dan yang ketiga adalah saling mengunjungi wilayah mentor oleh mentee dan sebaliknya.

Dalam implementasi program, mentor bertugas membimbing atau memberikan masukan kepada kabupaten peserta (mentee) terkait dengan apa yang harus dilakukan

untuk meningkatkan PALD di daerah mentee. Mentor berasal dari wilayah yang kondisi PALD-nya telah berjalan baik. Kondisi ini menjadi syarat utama mentor, sebab mentee bisa melihat langsung bukti keberhasilan mentor. Proses belajar dalam pendampingan Twinning Program dilakukan dengan saling berkunjung ke wilayah mentor dan mentee. Mentor untuk Kota Palopo adalah Kabupaten Gresik, sedangkan Kabupaten Sidoarjo menjadi mentor untuk Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang.

Isu atau topik program ada 5 yaitu tema 1 kegiatan mendesain, mengoperasikan dan memelihara IPLT konvensional. Tema kedua mendesain, mengoperasikan dan memelihara IPLT mekanis, ketiga perhitungan tarif dan kerja sama dengan swasta untuk LLTT, keempat mengelola pelanggan (termasuk *database* pelanggan dan promosi/pemasaran) dan topik kelima adalah penguatan dan mempersiapkan institusi UPTD PAL baru untuk mengelola air limbah (tinja).

Topik yang dipilih Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang adalah topik 1. Sedangkan topik 5 menjadi pilihan Kota Palopo. Lalu apa yang dilakukan ketiga peserta Twinning Program dari Sulawesi Selatan? Dalam perkembangan pendampingan program, ketiga daerah menemukan persoalan yang selama ini menjadi akar persoalan terhambatnya PALD di daerah masing-masing. Persoalan-persoalan itu multiaspek dan saling terkait. Alhasil, yang terjadi kemudian, perbaikan tata layanan PALD dilakukan dengan melakukan perbaikan di semua lini, dari hulu hingga hilir. Pada akhirnya, ketiga wilayah tidak memperbaiki terbatas pada topik utama saja, melainkan berkembang pada semua aspek dan akhirnya semua topik dikerjakan, karena saling berkaitan.

Perbaikan-perbaikan oleh Kota Palopo, Parepare dan Kabupaten Pinrang dilakukan pada aspek teknis di IPLT, kelembagaan di UPTD, penyediaan SOP, peningkatan SDM sampai pada dukungan pendanaan dan advokasi kepada pimpinan serta sosialisasi ke masyarakat. Semua aspek secara utuh



diperbaiki, agar kondisi PALD ke depan ideal dengan yang dicita-citakan.

Sejumlah perbaikan telah dilakukan oleh ketiga mentee. Di Kota Parepare, misalnya, sampai September 2020 telah menyelesaikan sejumlah pekerjaan teknis di IPLT di antaranya, memperbaiki bak penerima lumpur dan telah berfungsi dengan baik. Kondisi *imhoff tank* juga sudah berfungsi baik. Demikian halnya dengan perbaikan bak *aerobic* dan *anaerobic* pun sudah dilakukan, termasuk perbaikan dinding bak fakultatif yang bocor. Di samping aspek teknis, aspek non teknis juga diselesaikan, seperti perbaikan dan penambahan SOP UPTD PALD. Sisa aspek yang akan segera ditindaklanjuti adalah aspek kelembagaan dengan melakukan pemindahan UPTD PALD dari Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas PUPR.

Kabupaten Pinrang juga terus berbenah. Perbaikan aspek teknis yang sudah dilakukan di antaranya pemasangan looster pada lantai bak pengering dan pemasangan atap bak pengering.



Foto-foto: Dok. Ghulanyudi WJ

Sedangkan aspek non teknis yang telah dikerjakan adalah penambahan SOP Pengelolaan UPTD PALD.

Kota Palopo yang pada awal program fokus pada topik kelima telah menyelesaikan pemisahan UPTD TPA dan IPLT. Untuk PALD kini telah dikelola oleh UPTD PALD di bawah Dinas PUPR. Semula pengelolaan sampah dan air limbah domestik dikelola di bawah satu lembaga yakni UPT TPA dan IPLT. Untuk pembentukan UPTD PALD saat ini dalam proses finalisasi Rancangan Peraturan Walikota (Ranperwal) UPTD PALD. Di samping itu, proses serah terima aset IPLT juga sedang dalam proses finalisasi.

Kolaborasi

Melihat perkembangan yang terjadi, apa yang dapat dipelajari? Hal yang nampak jelas, adalah adanya kolaborasi parapihak dalam proses kerja-kerja tersebut. Semua hasil yang saat ini terjadi, lahir dari kerja bersama antarOPD. Hal ini dapat diketahui dari tim

Twinning Program yang dibentuk ketiga wilayah itu, yang terdiri dari sejumlah OPD terkait.

Dalam pandangan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Dometik (UPT PLCD) Kabupaten Gresik, Muhammad Arif Setiawan perkembangan yang terjadi pada mentee dihasilkan dari proses sinergi antarOPD yang sangat cepat. Hal itu memberi pembelajaran bagi semua pihak, bahwa sanitasi, khususnya pengelolaan lumpur tinja, tidak akan bisa dilakukan sendiri. Kerjasama atau kolaborasi adalah kunci.

Banyak pihak berharap, proses saling belajar yang dikenalkan Twinning Program khususnya adanya mentor, dapat direplikasi lebih luas lagi ke kabupaten/kota lainnya. Kepala UPTD PALD Kabupaten Sidoarjo, Indah Nursanti memiliki harapan serupa. Indah juga memiliki harapan besar pada provinsi bisa mereplikasi program Twinning Program ini.

“Saya berharap Twinning Program direplikasi oleh provinsi dengan cara provinsi menjadi mentor bagi kabupaten/kota di wilayahnya,” harapnya.

Harapan ini bukanlah keinginan yang terlalu muluk. Melihat peran provinsi dalam pembangunan sanitasi cukup strategis. Terlebih dalam salah satu tujuan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2020-2024 disebutkan salah satu ujuannya untuk meningkatkan peran provinsi dan kabupaten/kota melalui pendampingan berjenjang dalam mewujudkan peningkatan akses dan layanan sanitasi berkelanjutan dengan dukungan dari aspek regulasi, kelembagaan, pendanaan, perubahan perilaku dan pembangunan infrastruktur.

Ruang kolaborasi telah dibuka. Saatnya kini semua pihak memerankan diri sesuai dengan tugas dan kewenangannya, demi pembangunan sanitasi (khususnya pengelolaan air limbah domestik) menyeluruh dan berkelanjutan. Tentu, kita tak ingin mengulangi kesalahan di masa lalu, dengan melakukan tindakan yang sama.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program Kerja sama UNICEF - BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id



Illiterate, Parents Make Sure Their Children Able to Read Better

Oleh **KIAT Guru**

Waktu menunjukkan pukul dua sore lewat enam menit. Seorang anak laki-laki yang baru naik kelas tiga masuk ke ruangan kelas dengan buku tulis dan pensil di tangannya. Raut mukanya terlihat sedikit bingung untuk menentukan di mana ia harus duduk dan dengan siapa ia akan belajar sore itu.

“Sini.. sini.. dik,” ucap Pak Natalis—salah satu anggota Kelompok Pengguna Layanan Desa Balai Pinang Hulung, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapangsambil melambaikan tangannya dan melangkah menjemput sang anak untuk mengikutinya, duduk berhadapan dengannya di meja belakang ruang kelas.

“Siapa namamu?” tanya Pak Natalis. Sang anak menyebutkan namanya. “Kelas berapa kamu?” sambung Pak Natalis.

“Kelas tiga,” jawab anak laki-laki berkulit gelap manis dengan lugu.

“Kamu baru naik kelas tiga, ya?” Pak Natalis bertanya sekali lagi untuk

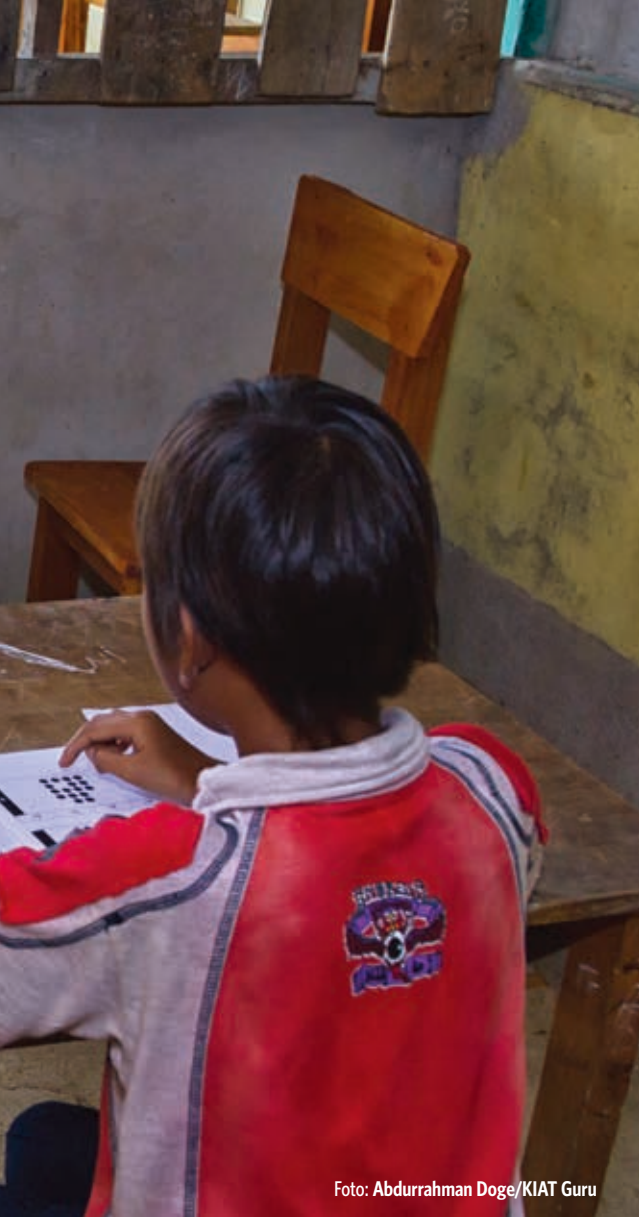


Foto: Abdurrahman Doge /KIAT Guru

Kegiatan Tes Cepat yang dilaksanakan di sebuah sekolah dasar di Kecamatan Simpang Hulu, Ketapang.

Foto : Abdurrahman Doge /KIAT Guru

Ketapang. Fasilitator Masyarakat KIAT Guru sangat khawatir terhadap kemampuan Pak Natalis. Pasalnya, beliau dinilai pemahamannya paling rendah ketimbang peserta lainnya. Beranjak dari kekhawatiran tersebut, Pak Natalis pun diajak fasilitator untuk melakukan latihan tambahan sehari sebelum pelaksanaan tes. Latihan yang mengambil waktunya di pagi hari sebelum berangkat ke tempat kerjanya di perusahaan sawit tidaklah dijalankannya dengan menggerutu. Pak Natalis malah mengikutinya dengan seksama dan mengatakan bahwa merasa lebih nyaman saat diberikan pelatihan secara individu oleh fasilitator. "Hari ini, kakak mau belajar bersama adik Bahasa Indonesia dan Matematika. Adik mau?" tanya Pak Natalis sebagai pengantar kepada anak sebelum memulai tes. "Mau...," sahut anak dengan lembut. Tes pun dimulai. Tidak sampai 15 menit tes selesai. Pak Natalis mengucapkan terima kasih kepada sang anak dan memberinya sebuah rautan dan penghapus sebagai tanda penghargaan atas waktunya. Pak Natalis tersenyum melihat hasil anak yang cukup memuaskan. Anak tersebut benar sudah mencapai kemampuan dasar kelas dua. Anak kedua, ketiga hingga kedelapan secara bergiliran menghampirinya untuk belajar bersama.

Hasilnya, fasilitator benar-benar terkejut sekaligus bangga melihat Pak Natalis yang dengan santai dan penuh konsentrasi memberikan soal-soal Bahasa Indonesia dan Matematika kepada anak yang dinilainya.

Kesabaran dan kemahirannya sangat terlihat saat beliau menilai kemampuan seorang anak laki-laki yang baru naik kelas dua. Anak ini merupakan anak ketujuh yang dinilainya hari itu sehingga tidak heran jika rasa lelah mulai menghampirinya. Namun, tak tersirat sama sekali di wajah Pak Natalis rasa itu meskipun bocah berbadan mungil di depannya memulai bacaan pertama dengan pengejaan yang sangat lambat dan lama.

meyakinkan dirinya, berada di kelas berapa anak tersebut di tahun ajaran sebelumnya sebagai acuan tingkat kemampuan yang perlu diukur pada anak hari itu. Anak menganggukkan kepalanya. Pak Natalis lalu mencatat anak tersebut sebagai kelas dua. Melalui penilaian Tes Cepat, akan dilihat apakah sang anak sudah mencapai kemampuan dasar Bahasa Indonesia dan Matematika kelas dua sebagai persyaratannya untuk naik kelas tiga.

Kenyamanan dan kemahiran Pak Natalis dalam melakukan tes cepat sangatlah mengejutkan. Tiga hari sebelumnya, saat menggelar pelatihan Tes Cepat untuk kader dan KPL KIAT Guru di Kecamatan Simpang Hulu,



Foto: Abdurrahman Doge/KIAT Guru

“N-I ni.. n-a na... Nina... p-e- pe-r-per... g-i-gi... pergi,” tutur anak tersebut terbata-bata.

Meski rasa iba menghinggapinya, Pak Natalis tetap diam dan menahan diri dari keinginan membantu sang anak membacakan soal yang sedang dikerjakannya. Ia ingat bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menilai kemampuan anak yang sebenarnya, tanpa bantuan guru maupun orang tua untuk menjawab soal-soal tersebut. Pak Natalis terus menatap dan mendengar saat sang anak bergumul membacakan 4 kalimat bacaan di depannya. Beliau hanya menganggukkan kepalanya sebagai tanda memberi semangat yang tidak bersuara.

Setelah dua menit, anak selesai membaca 4 kalimat tersebut. Saat diberikan pertanyaan terkait pemahaman terhadap bacaan tersebut, anak pun tidak bisa menjawabnya dengan benar. Karena sifat tes yang disesuaikan dengan kemampuan anak, Pak Natalis pun mencoba menurunkan tingkat kesulitan soal ke pengenalan huruf.

Pak Natalis menyebutkan satu huruf pada si anak dan si anak diharapkan dapat menunjuk dengan benar, huruf yang disebutkan Pak

Natalis dari pilihan huruf yang tersedia. Huruf pertama dijawab dengan benar; namun saat disebutkan huruf kedua, anak gagal untuk menunjuk dengan benar. Maka, sesuai instruksi pada saat pelatihan, Tes Bahasa Indonesia pun dihentikan dan dilanjutkan dengan Tes Matematika. Kemampuan sang anak tidak jauh berbeda untuk kedua mata pelajaran yakni di bawah standar kemampuan kelas satu padahal si anak barusan naik ke kelas dua.

Melihat sendiri kemampuan anak-anak yang tidak mencukupi standar kemampuan dasar Bahasa Indonesia dan Matematika membuat Pak Natalis prihatin sekaligus lebih tergerak untuk memastikan anak-anak di desanya dapat membaca, menulis dan menghitung lebih baik daripada kemampuannya sendiri. Beliau tidak sempat mengenyam pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, beliau berharap anak-anak di desanya akan lebih berpendidikan daripada dirinya.

Saat ditanya kesannya terhadap KIAT Guru dan Tes Cepat, Pak Natalis mengatakan, “Saya



Foto: Abdurrahman Doge/KIAT Guru

senang dapat bergabung dengan KIAT Guru, apalagi dengan adanya pelatihan dan pelaksanaan tes cepat kemampuan dasar murid ini. Dengan dilatih melakukan Tes Cepat, saya bisa tahu cara mengajar anak dengan lebih baik dan saya bisa tahu kemampuan sebenarnya anak SD di desa saya.” Beliau juga berencana untuk memberikan tes tersebut kepada anak-anak lain di desanya yang belum sempat dinilai hari itu.

Kisah Pak Natalis membuktikan bahwa para orang tua dan anggota masyarakat lain di sekitar sekolah dapat mendukung anak untuk mendapatkan pembelajaran berkualitas. Pak Natalis telah mengalahkan kekhawatiran dan kekurangan yang menghantuinya; “Apakah orang yang tidak berpendidikan guru seperti saya boleh dan bisa melaksanakan tes untuk anak sekolah?” Cerita ini juga mengingatkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab dan kerja sama antara guru dan orang tua murid. Oleh karena itu, orang tua murid pun perlu mengetahui jenis-jenis kemampuan dasar dalam membaca, menulis dan menghitung yang perlu dimiliki anak.

Selain sebagai perangkat untuk mengukur perkembangan kemampuan dasar murid di SD peserta rintisan KIAT Guru setelah satu semester berlalunya program, tes cepat juga adalah salah satu cara cepat, tepat dan mudah dilakukan oleh masyarakat desa terpencil, yang sebagian besar tidak memiliki sarjana pendidikan atau latar belakang pedagogi lainnya.

Dengan perangkat tersebut, masyarakat dapat mengetahui tidak hanya jenis-jenis pembelajaran yang diterapkan di sekolah dasar tetapi sejauh mana anak-anak mereka menguasai kemampuan baku yang diperlukan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Hasil dari tes cepat ini juga diharapkan dapat memunculkan janji layanan antara masyarakat dan sekolah yang jika dilakukan, akan berdampak pada peningkatan kemampuan dasar murid.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari <http://bit.ly/KIATGuru>

Kerentanan Anak terhadap Kekerasan Selama Pandemi

Oleh **NOPITRI WAHYUNI**

Ingar bingar pemberitaan seorang anak perempuan inisial NV (13 tahun) asal Lampung yang mengalami pelecehan seksual oleh pamannya sendiri kembali muncul di berbagai media massa. Ironisnya, berita terbaru mengungkapkan bahwa korban yang dititipkan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tersebut kembali mengalami pelecehan seksual oleh aparaturnya setempat. Lembaga yang diharapkan dapat menaungi anak dan perempuan dari berbagai kasus kekerasan maupun diskriminasi justru menodai maksud keberadaan “rumah aman” itu sendiri.

Kasus NV pada dasarnya merupakan satu dari sekian kasus kekerasan yang tampak di permukaan. Pada masa pandemi saat ini, risiko kekerasan tersebut semakin tinggi. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) sejak bulan Januari hingga 23 Juli 2020, terdapat 1.771 kasus kekerasan yang menimpa korban usia anak 0-12 tahun. Di samping itu, terdapat 2.370 kasus kekerasan yang dialami korban anak remaja usia 13-17 tahun. Kemudian, data tersebut pun menyebutkan bahwa terdapat 620 kasus yang pelakunya merupakan orang tua dari korban dan 373 kasus yang pelakunya merupakan keluarga/saudara.

Pandemi mengharuskan keluarga lebih banyak melakukan segala aktivitas dari rumah. Bukan hanya berkegiatan secara ekonomi, tetapi juga proses belajar menjadi serba daring. Banyak anak akhirnya tidak bertemu secara tatap muka dengan para guru maupun orang dewasa lainnya yang biasanya akan menaruh perhatian terhadap kondisi kesejahteraan mereka. Di sisi lain,

pandemi tengah menciptakan kondisi bagi tingginya kekerasan terhadap anak dan pada saat yang sama, banyak kasus tak tertangani dengan baik. Data SIMFONI PPA di atas menunjukkan bahwa terdapat 3.175 kasus kekerasan terjadi dalam lingkup rumah tangga dan melibatkan kurang lebih 4.252 korban.

Sebagian besar kasus memang didominasi oleh kasus kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Berdasarkan sumber data yang sama, terdapat 2.435 kasus termasuk dalam jenis kekerasan fisik diikuti oleh 1.559 kasus kekerasan psikis dan 2.148 kasus kekerasan seksual. Lain lagi, kasus-kasus penelantaran, perdagangan orang maupun eksploitasi pun masih kerap terjadi dengan jumlah 490 kasus, 111 kasus dan 72 kasus secara berurutan. Pada konteks kekerasan pada anak, tiga jenis kekerasan di atas pun semakin memprihatinkan dengan maraknya eksploitasi dan perdagangan anak dengan tujuan pekerja rumah tangga maupun pekerja seks anak.

Setiap daerah di Indonesia pun memiliki tingkat kerentanan terhadap risiko kekerasan anak yang berbeda. Berdasarkan provinsi, terdapat empat provinsi tertinggi yang memiliki jumlah korban kekerasan terhadap anak tertinggi. Provinsi Jawa Timur menempati angka tertinggi dengan angka 350 korban anak, diikuti dengan Provinsi Jawa Tengah dengan 336 korban anak, Sulawesi Selatan dengan 270 korban anak dan Jawa Barat dengan 253 korban anak. Tingginya kasus di daerah-daerah tersebut juga bisa dilihat dari aspek sosio-ekonomi yang beragam, terutama pada masa pandemi yang juga menimbulkan momok bagi tingkat kesejahteraan pada anak-anak.

Hari Anak Nasional di Tengah Pandemi

Tepat pada tanggal 23 Juli lalu diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Di tengah-tengah pandemi, perayaan tersebut menjadi momentum menengok persoalan genting yang tengah terjadi, terutama terkait dengan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kecemasan yang dirasakan menyoal risiko tercerabutnya kesehatan fisik, pendidikan jarak jauh maupun penurunan kesejahteraan ekonomi membuat anak amat rentan terhadap risiko kekerasan. Apalagi, pada situasi rumah tangga yang mengalami disfungsi, baik telah terpapar kekerasan dalam rumah tangga, orang tua

pemakai obat-obatan terlarang maupun masalah kesehatan jiwa di dalam rumah tangga, risiko kekerasan tersebut akan semakin tinggi (Agrawal, 2020).

Situasi pandemi memang tak bisa dilepaskan dari tantangan kepada keluarga untuk tetap memastikan anak dalam kondisi yang sehat dan aman. Masalahnya, semakin lama keluarga terkurung dengan berbagai kebijakan pembatasan sosial, semakin banyak orang tua mengalami kesulitan besar dalam memastikan anak-anak tetap makan dengan baik, menjaga mental anak dalam kondisi yang baik maupun mendampingi anak dalam proses belajar dari rumah.

Kondisi di atas pada akhirnya berdampak terhadap kesehatan mental pada anggota keluarga. Pada keluarga yang mengalami disfungsi, setiap hari anak secara terus menerus berhadapan dengan pelaku kekerasan potensial di sekitar mereka. Kondisi yang mengharuskan tetap tinggal dengan pelaku tentunya akan mengurangi rasa aman yang akhirnya menimbulkan tekanan fisik maupun psikologis. Di sisi lain, para pelaku memiliki perilaku mengontrol dan tindakan kekerasan sebagai bentuk mekanisme koping atas perasaan kehilangan kontrol pada masa krisis (Peterman dkk, 2020). Hal inilah yang mengarahkan pada berbagai kekerasan, baik fisik, mental dan seksual pada anak.

Bahkan, dalam konteks keluarga yang memiliki kerentanan sosio-ekonomi tinggi, mereka pun memiliki strategi kemampuan beradaptasi yang rendah. Selain disfungsi keluarga yang sebelumnya telah disebutkan, tekanan ekonomi, permasalahan utang dan perilaku lainnya pun menyebabkan kekerasan terhadap anak. Anak akan rentan tereksplotasi dan mengalami pemaksaan perkawinan sebagai alat tukar terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi. Anak perempuan, terutama, pada akhirnya harus melepaskan kesempatan belajar mereka dan mengurus keluarga. Catatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020), terdapat kenaikan mencapai 24 ribu permohonan dispensasi perkawinan pada masa pandemi ini.

Tak ayal kekerasan terhadap anak dengan berbagai bentuk telah menceraub hak-hak anak untuk hidup sejahtera. Kondisi di atas membutuhkan perhatian berbagai pihak.

Tindakan konkret yang dapat dilakukan saat ini ialah memaksimalkan pencegahan dan saluran pusat pengaduan bagi kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini perlu ditingkatkan pada sisi kesadaran dan komunikasi mengenai layanan, baik pemberitaan rutin maupun upaya-upaya advokasi. Bagi kasus-kasus kekerasan seksual, momentum ini juga tepat untuk mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang dibutuhkan untuk melengkapi Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama terkait dengan jenis-jenis kekerasan seksual yang tidak termaktub dalam peraturan yang sudah ada.

Kemudian, tingginya kasus kekerasan terhadap anak pun harus direspons dengan memastikan penanganan kasus terintegrasi dengan respons layanan kesehatan dan rumah aman yang memadai. Akses layanan kesehatan dan rumah aman dibutuhkan bagi korban maupun penyintas kekerasan agar memperoleh pemulihan secara psikososial, terhindar dari ketidakstabilan dalam rumah tangga maupun ancaman kehilangan tempat tinggal bagi penyintas melalui mekanisme subsidi dan program sosial lainnya. Perhatian terhadap perbaikan kualitas layanan kesehatan dan rumah aman ini diharapkan mampu menghapus kasus-kasus seperti yang dialami NV di awal tulisan ini.

Terakhir, kasus kekerasan terhadap anak juga mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan sistem perlindungan sosial pada masa pandemi. Berbagai bentuk bantuan sosial protektif, baik berupa bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan), manfaat bagi penganggur (Kartu Prakerja) maupun program sosial lainnya dapat memampukan keluarga dalam skala sosio-ekonomi rumah tangga agar dapat beradaptasi dengan krisis dan memitigasi ancaman krisis dalam jangka panjang. Adanya perlindungan sosial tersebut diharapkan dapat membantu keluarga untuk memenuhi tanggung jawab perawatan terhadap anak dan memastikan anak dapat berkembang secara optimal seiring transisi menuju pasca pandemi dan masa mendatang.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah seorang peneliti Bidang Sosial pada The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research dan dapat dihubungi melalui email: nopitri@theindonesianinstitute.com

Artikel ini bersumber dari :
<https://www.theindonesianinstitute.com/kerentanan-anak-terhadap-kekerasan-selama-pandemi/>

Pemodelan Pembelajaran Lokal Sekolah Formal dengan Pendekatan Sekolah Kampung

Oleh **JOHN RAHAIL**

Sejak tahun 2007, pengembangan layanan pendidikan berbasis kontekstual sesuai dengan nilai dan kearifan lokal Papua melalui pendekatan Sekolah Kampung di Tanah Papua, mulai dikembangkan oleh Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (ICDp) dengan dukungan UNDP pada beberapa kampung di wilayah pesisir pantai utara Papua yang berpusat di Kampung Beneraf Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi yang terletak ± 325 kilometer di sebelah barat Kota Jayapura ibukota Provinsi Papua.

Inovasi ini sebagai terobosan dalam upaya pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan bagi masyarakat terutama anak-anak usia sekolah tingkat pendidikan dasar (SD-SMP) maupun yang tidak bersekolah dan putus sekolah di wilayah pinggiran dan pedalaman



Foto: Dok. Yayasan BaKTI

Papua. Layanan pendidikan ini dilakukan melalui pendekatan yang berbasis nilai dan kearifan lokal melalui pendekatan Sekolah Kampung dengan misi “Membangun rasa percaya diri anak-anak di kampung, sehingga suka belajar dan mencintai sekolah” agar anak-anak usia sekolah di kampung siap secara mental, emosional, sosial dan psikologis saat memasuki pendidikan formal (SD), dan anak-anak yang sudah sekolah (SD-SMP) tidak putus sekolah sehingga dapat mendukung upaya pemerintah dalam pencapaian tuntas Program Wajib Belajar (WAJAR) 9 tahun.

Sekolah Kampung sebagai Pendekatan

Sekolah Kampung bukanlah sebuah sekolah formal yang memiliki bangunan fisik gedung, guru, kurikulum baku, dan warga belajar harus berseragam, bahkan membekali warga belajar dengan ijazah. Namun sekolah kampung merupakan upaya pendekatan yang memberikan kekuatan dari dalam diri untuk membangun visi masa depan dengan menumbuhkan rasa percaya diri sehingga tidak ada kata bodoh dan pemalas. Hal ini dimaksudkan agar warga belajar menjadikan sekolah dan proses belajar sebagai kebutuhan, bukan menjadi beban ketika waktunya harus ke sekolah.

Untuk itu pendekatan sekolah kampung menjadi jembatan untuk menguatkan pemahaman masyarakat bahwa pendidikan adalah investasi yang secara sosial murah, sehingga membangun optimisme masyarakat yang selama ini apatis karena pengalaman layanan pendidikan di sekolah yang tidak optimal karena berbagai alasan (kepala sekolah dan guru tidak berada di tempat tugas, tidak tersedia buku paket dan media pembelajaran) telah menyebabkan rendahnya motivasi orang tua siswa dan masyarakat, serta partisipasi masyarakat yang semu dalam mendukung anak ke sekolah, sehingga anak lebih sering ikut membantu pekerjaan orangtua di rumah, kebun dan dusun.

Pendekatan sekolah kampung menjadi alternatif sebagai aktivitas bersama mendorong pelaksanaan layanan pendidikan bagi semua orang di kampung yang dilakukan terintegrasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya lokal masyarakat dengan membangun jejaring dan kemitraan bersama *stakeholder* lokal sesuai struktur dan fungsi sosial yang lahir, hidup dan berkembang dalam masyarakat kampung, dengan cara:

Masuk dalam komunitas lokal melalui pintu sosial dengan membangun jejaring kemitraan dan komunikasi yang setara dengan unsur 3 tungku (pemerintah kampung, adat dan agama) dan unsur 2 peran (perempuan dan pemuda) sehingga tidak lagi membentuk kelompok baru dalam kampung karena alasan administratif.

Memberdayakan potensi dan sumber daya lokal dengan “tidak membawa baju baru ke kampung, tetapi merapikan baju masyarakat kampung” sebagai bentuk penguatan nilai dan kearifan lokal yang diintegrasikan dalam proses belajar mengajar.

Melangkah dan menyatu bersama dalam aktivitas dan rutinitas masyarakat lokal sebagai proses belajar berdasarkan peran masing-masing komunitas suku dan sub-suku sebagai aktor penggerak, sehingga masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek tetapi justru sebagai subjek.

Membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat bahwa layanan pendidikan sebagai proses bersama secara aktif melalui dukungan “biaya sosial” sehingga menghindarkan partisipasi semu.

Cara pendekatan ini memberikan ruang dan peluang bagi masyarakat lokal yang difasilitasi untuk menolong dirinya dengan kekuatannya sendiri melalui pendampingan sebagai penggerak dan pengelola sekolah kampung, menggunakan pendekatan dari falsafah lokal yang terkandung dalam kebiasaan “bakar batu (bagi habis tugas), makan pinang (menyatu dalam peran) dan makan papada (terpadu dalam kebersamaan)”. Hal ini dilakukan untuk memperkuat identitas dan jati diri masyarakat lokal Papua dalam membangun dan menjaga dinamika layanan pendidikan melalui pendekatan sekolah kampung dengan semangat kerja sama yang menyatu sesuai peran sosial, mengedepankan kebersamaan wujudkan peran yang partisipatif, terpadu dan harmoni menuju pada kemandirian yang keberlanjutan.

Pembelajaran dengan Pendekatan Sekolah Kampung

Proses pembelajaran dengan pendekatan sekolah kampung sangat tidak tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana seperti gedung, meja-kursi, papan tulis, alat peraga pendidikan dan juga pelaku yang terlibat khusus sebagai pengajar. Hal ini disebabkan karena

proses pembelajarannya yang khas dan kontekstual, sehingga bagi masyarakat dan warga belajar sekolah kampung dianggap sebagai rumahku, bahasaku, kebunku, dusunku dan kampungku karena menggunakan sumber dan media bahan ajar lokal berupa kayu, daun, buah, batu, pasir, lumpur, rotan, tali dan limbah tanaman (kulit kayu, gaba, lidi, sabut dan tempurung kelapa) dan lain sebagainya.

Berbagai jenis permainan asli lokal yang selalu dilakukan dan dimainkan anak-anak di kampung, telah diinventarisir dan diidentifikasi dengan bahasa daerah lokal (bahasa ibu) yang berarti sebagai permainan yang bisa dan biasa dilakukan semua orang (besar-kecil, laki-perempuan, tua-muda) di kampung. Permainan lokal tersebut kemudian disimulasikan melalui pendekatan lokal yang dipandu penggerak dan dikonversikan ke dalam materi pelajaran matematika, IPA, PKn, pendidikan karakter dan lain-lain yang diterapkan dalam proses pembelajaran secara dinamis sesuai dengan karakter anak-anak di kampung dengan metode bermain dua kali sama dengan belajar satu kali.

Inovasi Pendekatan Sekolah Kampung dalam Pembelajaran Formal

Dalam upaya melakukan pengembangan pendekatan sekolah kampung, maka sejak tahun 2019 mulai dilakukan replikasi dengan inovasi pengintegrasian model pembelajaran lokal dengan pendekatan sekolah kampung ke dalam proses belajar-mengajar pendidikan formal sekolah dasar di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat yang difasilitasi melalui program CSR LNG Tangguh.

Langkah ini diambil sebagai upaya strategis dalam membuka ruang secara optimal untuk bagaimana pemenuhan kebutuhan atas hak pendidikan sebagai jawaban keberpihakan program yang memberikan peluang cara masyarakat menolong dirinya dengan kekayaan potensi dan sumber daya lokal yang diformulasikan melalui pendekatan sekolah kampung dan disinergikan dengan upaya formal pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan pada satuan pendidikan dasar, terutama sekolah dasar.

Kegiatan inovasi pemodelan pembelajaran lokal dalam pendidikan formal melalui pendekatan sekolah kampung dilakukan di SD Inpres Kampung

Tomu Distrik Tomu Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, bertujuan untuk:

Mendorong pengembangan pemodelan pembelajaran lokal berbasis kontekstual melalui pendekatan sekolah kampung sesuai nilai dan kearifan lokal yang terintegrasi dalam proses belajar mengajar di sekolah formal dalam hal ini SD.

Mendukung terbangunnya relasi yang dinamis melalui ketersediaan layanan pendidikan melalui pendekatan sekolah kampung dengan mengedepankan peran serta masyarakat (PSM) untuk saling bersinergi dengan pihak sekolah (guru) secara terpadu, partisipatif dan berkelanjutan dalam mendukung pembelajaran anak saat di sekolah yang dilanjutkan di rumah, maupun sebaliknya sehingga terbangun atmosfer belajar yang dinamis.

Mendorong peningkatan partisipasi dan motivasi belajar anak-anak usia prasekolah dan usia sekolah yang sedang bersekolah untuk suka belajar, mencintai sekolah dan bangga sebagai anak sekolah yang menghormati dan menghargai sesama teman, guru dan orang tua.

Karena pembelajaran lokal melalui layanan pendidikan formal di sekolah, maka sebagai aktor lokal penggerak sesuai dengan rekomendasi institusi lokal di kampung, kepala sekolah dan komite sekolah adalah tokoh lokal dan beberapa guru SD yang kemudian difasilitasi dalam pelatihan dan pendampingan. Kegiatan pembelajaran lokal di sekolah tidak membutuhkan penambahan waktu dan jadwal baru, namun diterapkan sesuai dengan jadwal proses belajar mengajar sebagaimana sudah tersusun pada masing-masing kelas yang dibedakan menurut kelas rendah terdiri dari kelas 1 sampai 3 dan kelas tinggi termasuk kelas 4 sampai 6.

Sekolah kampung adalah salah satu praktik cerdas yang didokumentasi dan dipromosikan BaKTI pada Panggung Festival Forum Kawasan Timur Indonesia ke 5 tahun 2010 di Ambon.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Penggagas Sekolah Kampung dan dapat dihubungi melalui email: icdppapua@yahoo.co.id



DISKUSI ONLINE LIVE DI **Instagram Story @infobakti**



KELOMPOK KB PRIA BERPARTISIPASI DALAM PENANGANAN STUNTING

Di Desa Arakan, Minahasa Selatan Pak Ismail Husen bersama 77 orang Peserta KB Pria terlibat aktif dalam menangani *stunting* di desa mereka. Didasari oleh pertimbangan bahwa seharusnya persoalan *stunting* menjadi perhatian semua karena *stunting* disebabkan faktor multidimensi yang membutuhkan peran semua pihak termasuk bapak-bapak. Pentingnya peran ayah dalam pola asuh yang baik untuk nutrisi anak dan pengetahuan mengenai nutrisi ibu hamil guna mencegah *stunting*, termasuk penyebab dan bagaimana cara pencegahan serta penanganannya. Awalnya mereka menolak, karena mereka berpendapat bahwa kegiatan Posyandu adalah kegiatan ibu-ibu, namun setelah diyakinkan bahwa urusan kesehatan anak adalah urusan bersama antara ayah dan ibu, mereka kemudian setuju dan bersedia.

Kegiatan Posyandu dimana peserta KB dilibatkan sudah dimulai sejak November 2019 hingga saat ini. Seperti kontrasepsi bukan hanya kewajiban salah satu pihak, penanganan *stunting* terkait tumbuh kembang anak juga bukan semata tanggung jawab ibu tetapi harus dilakukan bersama dengan bapak, peran ini kemudian yang dilakukan oleh para peserta KB Pria di Sulawesi Utara.



PEREMPUAN BILANG APA: MENJADI GURU, MENGURUS RT DAN #WFH

Bekerja dari rumah mungkin mudah bagi sebagian orang, tapi mendatangkan tantangan tersendiri bagi sebagian lainnya. Khususnya bagi para ibu yang dituntut untuk tetap produktif bekerja sekaligus mengelola rumah tangga di saat yang bersamaan. Baik sebagai ibu rumah tangga maupun perempuan bekerja, beban di pundak perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki ketika peran gender tradisional diterapkan. Ibu rumah tangga saja dapat merasa lebih tertekan ketika mengurus anak dan suaminya selama hampir sehari-hari pada masa pemberlakuan *social distancing* ini, apalagi perempuan-perempuan bekerja. Sebagian dari mereka menganggap bekerja di rumah dengan hasil optimal itu mitos belaka. Pasalnya, fokus bekerja mereka sangat mungkin terpecah, terlebih bila pasangan juga bekerja dan tidak bisa (atau tidak mau) mengurus anak dan rumah, serta tidak

ada sistem pendukung yang bisa diandalkan dalam rumah tangga.

Ibu Ema Husain berbagi cerita dan pengalaman peran perempuan di tengah pandemi. Mencakup beberapa topik seputar dampak *social distancing* terhadap perempuan, mulai dari ibu yang kewalahan bekerja di rumah sembari mengurus keluarga, seberapa kuat pasangan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang mau tidak mau harus dijalankan sehingga tidak berujung pada kekerasan rumah tangga.



REALOKASI ANGGARAN RESES DPRD MAROS UNTUK PENANGGULANGAN COVID-19

DPRD Maros turut mendukung pemerintah dengan sejumlah kebijakan untuk merespons penanganan COVID-19 di Kabupaten Maros. Baru-baru ini DPRD Maros merelokasi anggaran reses masa sidang kedua anggota DPRD Maros untuk penanganan COVID-19. Anggaran 1 miliar rupiah tersebut dialokasikan untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis, khususnya pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di tingkat Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan pertama di masyarakat, ketersediaannya saat ini masih sangat terbatas. Walaupun pemerintah sendiri telah mengalokasikan dana 6 miliar rupiah, namun guna memaksimalkan penanganan COVID-19 perlu pendanaan lebih dan seluruh anggota DPRD Maros telah menyepakati membatalkan reses masa sidang kedua dan merelokasi anggaran

reses. Dengan rincian sekitar 20 juta rupiah yang diterima tiap anggota dewan sekali reses ditambah anggaran perjalanan konsultasi yang dialihkan. Anggaran ini akan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Maros, dengan harapan dapat membantu pemerintah dalam penanggulangan COVID-19.

Artikel

Bagaimana Ilmuwan Bisa Bantu Rumuskan Kebijakan Berbasis Bukti yang Diterima Secara Politik

Riset dan bukti ilmiah lainnya merupakan salah satu faktor yang berkontribusi secara signifikan pada seberapa efektifnya kebijakan pemerintah.

Penelitian dari lembaga studi pembangunan di Inggris, Overseas Development Institute, menyimpulkan bahwa kebijakan dengan basis ilmiah yang kuat dapat membantu negara berkembang dalam menyelamatkan nyawa dan memangkas kemiskinan dengan lebih tepat sasaran.

Namun, seringkali hal tersebut menemui hambatan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki pembuat kebijakan.

<https://batukarinfo.com/node/35562>

Referensi



Mengubah Lewat Berita Jurnalisme Berperspektif Perempuan, Anak & Disabilitas

Media mempunyai kekuatan dalam memengaruhi proses-proses di ruang publik, termasuk kebijakan publik. Media sendiri merupakan ruang publik karena memfasilitasi terjadinya perdebatan publik untuk mempertemukan berbagai gagasan dan kepentingan. Ruang publik yang disediakan media telah menjadi keniscayaan di negara-negara demokrasi, sehingga media disebut-sebut sebagai pilar keempat demokrasi.

Namun media sebagai institusi, juga mempunyai agenda dan kepentingan sendiri, yang tidak jarang berbenturan dengan kepentingan publik. Jurnalis atau wartawan yang merupakan pekerja media juga adalah orang-orang yang tidak hidup di ruang hampa, tetapi juga adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan, yang membentuknya ketika melihat, mempersepsi, dan mengontruksi suatu berita.

Berangkat dari pertimbangan tersebut, Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) BaKTI membangun kemitraan dengan media, baik dengan jurnalis (organisasi jurnalis) maupun dengan mediana. Harapannya jurnalis dan media dapat menyajikan pemberitaan yang lebih berpihak pada kelompok rentan, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang dapat memberdayakan kelompok-kelompok rentan tersebut.

<https://batukarinfo.com/referensi/mengubah-lewat-berita-jurnalisme-berperspektif-perempuan-anak-disabilitas>

Peluang

The Governing in the Digital Age (The Use of Data for Better Policies and Public Services) Short Term Award

Are you keen to learn about the use of data for better policies and public services? If you currently work in a relevant role in a national or subnational Indonesian Government agency or a research institution, apply for the Governing in the Digital Age (The Use of Data for Better Policies and Public Services) Short Term Award.

The course aims to strengthen the capacity of government (both national and subnational) in producing, analysing and using data to inform policy decisions. The course will provide examples, strategies and tools utilised by international, Indonesian and Australian agencies on the use of data, including big data for policy making and implementation. The course will contribute to inform Indonesia's response to COVID-19 especially in analysing and using data

This is a fully funded course. Women and people with disabilities are encouraged to apply. All applications MUST be submitted online before 3 January 2021.

For more information:

<https://batukarinfo.com/node/35570>